

# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat RahmatNya jualah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan LAKIP ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2019 ini adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta dalam rangka kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang ada. Hasil pengukuran Kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan selama tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini tentu belum sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kepada semua pihak/pengguna Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, kami mengharapkan masukan dan saran untuk penyempurnaan dalam penyusunan LAKIP di tahun yang akan datang

Pelaihari, Januari 2020

Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup  
  
Ir. H. Muhandad Mursy, M.Si  
Nip. 19680304 199803 1 009

# **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada SKPD ini. telah dapat melaksanakan 14 sasaran dengan 2 Indikator kinerja utama dengan 12 sasaran strategis renstra.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut telah membuat Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang terdiri dari 12 (Dua belas) Sasaran Strategis dan semua telah dilaksanakan dengan baik.

Pada tahun anggaran 2019 ini, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 47.329.308.754,- (termasuk anggaran perubahan), yang terdiri atas Belanja Langsung sebesar Rp.38.071.952.156,- dan Belanja Tak Langsung sebesar Rp 9.257.356.598,-

*Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja*

NO	ITEM ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 9.257.356.598,-	Rp. 6.999.979.054,-	75,62
2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 47.329.308.754,-	Rp. 37.206.136.926,-	78,61

*Sumber : Subbag Keuangan DPRKPLH 2019*

Realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 sebesar **78,61% (TINGGI)** sedang realisasi anggaran Belanja Tak Langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2019 adalah sebesar **75, 62% (SEDANG)**.

*Skala Nilai Peringkat Kinerja*

No	Capaian Kinerja	Interpretasi	Warna
1	$\geq 91$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

*Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010*

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi .....	2
C. Struktur Organisasi dan Personil.....	3
D. Aspek Strategis Organisasi .....	10
E. Kegiatan dan Produk Organisasi.....	11
F. Landasan Hukum.....	13
G. Sistematika Penyajian.....	14
 <b>BAB II      PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	16
B. Tujuan.....	19
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
D. Sasaran Strategis.....	21
E. Program dan Kegiatan .....	25
F. Perjanjian Kinerja 2019.....	28
 <b>BAB III      DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN                  PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP                  KABUPATEN TANAH LAUT</b>	
A. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	33
1. Target dan Capaian IKU (Tabel).....	34
2. Uraian dan Analisa Capaian IKU.....	37
B. Capaian Sasaran Strategis.....	63
1. <i>Sasaran 1. Meningkatnya wilayah bebas             pencemaran lingkungan.....</i>	63
2. <i>Sasaran 2 : Meningkatnya penyelesaian             pengaduan lingkungan hidup.....</i>	64
3. <i>Sasaran 3 : Meningkatnya ketaatan pelaku</i>	69

	<i>usaha terhadap pengelolaan lingkungan.....</i>	
4.	<i>Sasaran 4 : Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah.....</i>	73
5.	<i>Sasaran 5 : Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).....</i>	77
	<i>Sasaran 6 : Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenyediaan fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).....</i>	79
7.	<i>Sasaran 7 : Meningkatnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup..</i>	81
	<i>Sasaran 8. Meningkatnya Pelayanan Kebersihan, Kenyamanan Jalan Umum serta Keindahan.....</i>	111
9.	<i>Sasaran 9. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan.....</i>	119
10	<i>Sasaran 10 : Meningkatnya pengelolaan Sarana dan Prasarana kantor.....</i>	120
11	<i>Sasaran 11. Meningkatnya tata kelola administrasi umum dan kepegawaian</i>	121
	 C. Akuntabilitas Keuangan.....	128
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan.....	138
	B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	139



DAFTAR TABEL

Tabel 1	<i>Komposisi Personil (ASN + PTT) DPRKPLH Tanah Laut per 31 Des. 2019</i>	Hal 8
Tabel 2	<i>Komposisi Personil (ASN + PTT) DPRKPLH Tanah Laut berdasar Tingkat Pendidikan per 31 Des. 2019</i>	8
Tabel 3	<i>Komposisi Personil (ASN + PTT) Berdasar Golongan per 31 Des. 2019</i>	9
Tabel 4	<i>Komposisi Personil (ASN dan PTT) Berdasar Formasi Jabatan per 31 Des. 2019</i>	9
Tabel 5	<i>Indikator Kinerja Utama (IKU)</i>	20
Tabel 6	<i>Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut</i>	22
Tabel 7	<i>Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut</i>	29
Tabel 8	<i>Capaian Kinerja</i>	32
Tabel 9	<i>Skala Nilai Peringkat Kinerja</i>	33
Tabel 10	<i>Target dan Capaian IKU 2019</i>	34
Tabel 11	<i>Interprestasi Capaian Kinerja DPRKPLH 2019</i>	36
Tabel 12	<i>Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Kab. Tala Tahun 2013-2019</i>	39
Tabel 13	<i>Indeks Kualitas Air Kab. Tanah Laut</i>	41
Tabel 14	<i>Indeks Kualitas Udara Ambient</i>	45
Tabel 15	<i>Indeks Kualitas Udara Ambient Kab. Tanah Laut 2019</i>	49
Tabel 16	<i>Indeks Kualitas Udara Ambient Kab. Tanah Laut 2019</i>	50
Tabel 17	<i>Penyebaran Jaringan Penerangan</i>	51
Tabel 18	<i>Pemasangan jaringan Tahun 2019</i>	52
Tabel 19	<i>Perbandingan RTH di Kota Pelabuhan Dengan Undang-Undang</i>	54
Tabel 20	<i>Perluasan Taman/ RTH</i>	55
Tabel 21	<i>Klasifikasi Pengaduan per 31 Desember 2019</i>	66
Tabel 22	<i>Persentase Pelaku usaha yang taat aturan</i>	71
Tabel 23	<i>Penerima Penghargaan Lingkungan 2019</i>	74
Tabel 24	<i>Lokasi Kegiatan Pemantauan Kualitas Air</i>	82
Tabel 25	<i>Capaian IKU Pemantauan Lingkungan</i>	83
Tabel 26	<i>Lokasi pengujian kualitas udara ambient Kabupaten Tanah Laut</i>	88
Tabel 27	<i>Nama Perusahaan, Unit Pengelolaan Limbah Cair dan Titik Koordinat di Kecamatan Jorong dan Kintap</i>	93
Tabel 28	<i>Lokasi Kegiatan Pengujian Kualitas Limbah Cair Industri di Kecamatan Bati Bati dan Pelabuhan</i>	94
Tabel 29	<i>Hasil Pengujian Kerusakan Tanah Kecamatan Bumi Makmur Tahun</i>	109

2019

Tabel 30	<i>Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota</i>	111
Tabel 31	<i>Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2019</i>	123
Tabel 32	<i>Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019</i>	129
Tabel 33	<i>Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas PerumahanRakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut</i>	129
Tabel 34	<i>Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tahun 2019</i>	130
Tabel 35	<i>Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja</i>	137



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut diberikan mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, penataan kota dan pengelolaan persampahan serta lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan mandat ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut , selanjutnya disebut dengan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

LAKIP DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian Kinerja DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut.

## **B. Tugas dan Fungsi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016, DPRKPLH Kab. Tanah Laut mempunyai tugas *melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah*. Dan untuk menyelenggarakan tugas tersebut, DPRKPLH Kab. Tanah Laut mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas;
- e) Pembinaan UPT dinas dan;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- g) mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas dan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- h) mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- i) mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- j) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman;
- k) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata kota dan kebersihan;

- l) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan tata lingkungan;
- m) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- n) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- o) mengoordinasikan, membina dan mengawasi memberikan perizinan / non perizinan / rekomendasi teknis bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- p) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- q) memantau dan mengevaluasi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan lingkungan hidup;
- r) mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
- s) membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **C. Struktur Organisasi dan Personil**

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Adapun Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a) *Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ;*
- b) *Kesekretariatan*, terdiri dari :
  - 1) Sekretaris
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Sub Bagian Perencanaan; dan
  - 4) Sub Bagian Keuangan.

c) *Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman* terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 2) Seksi Data dan Perencanaan Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman; dan
- 3) Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman.

d) *Bidang Tata Kota dan Kebersihan*, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Tata Kota dan Kebersihan
- 2) Seksi Penerangan Jalan Umum;
- 3) Seksi Kebersihan dan Limbah; dan
- 4) Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau

e) *Bidang Tata Lingkungan*, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan
- 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
- 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- 4) Seksi Inventarisasi RPPLH & KLHS.

f) *Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 2) Seksi Kerusakan Lingkungan;
- 3) Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
- 4) Seksi Pencemaran Lingkungan.

g) *Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup*, terdiri dari :

- 1) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- 2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- 3) Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa; dan
- 4) Seksi Penegakan Lingkungan Hidup.

*h) UPT Laboratorium :*

1) Kepala Laboratorium;

2) Kasubbag Tata Usaha

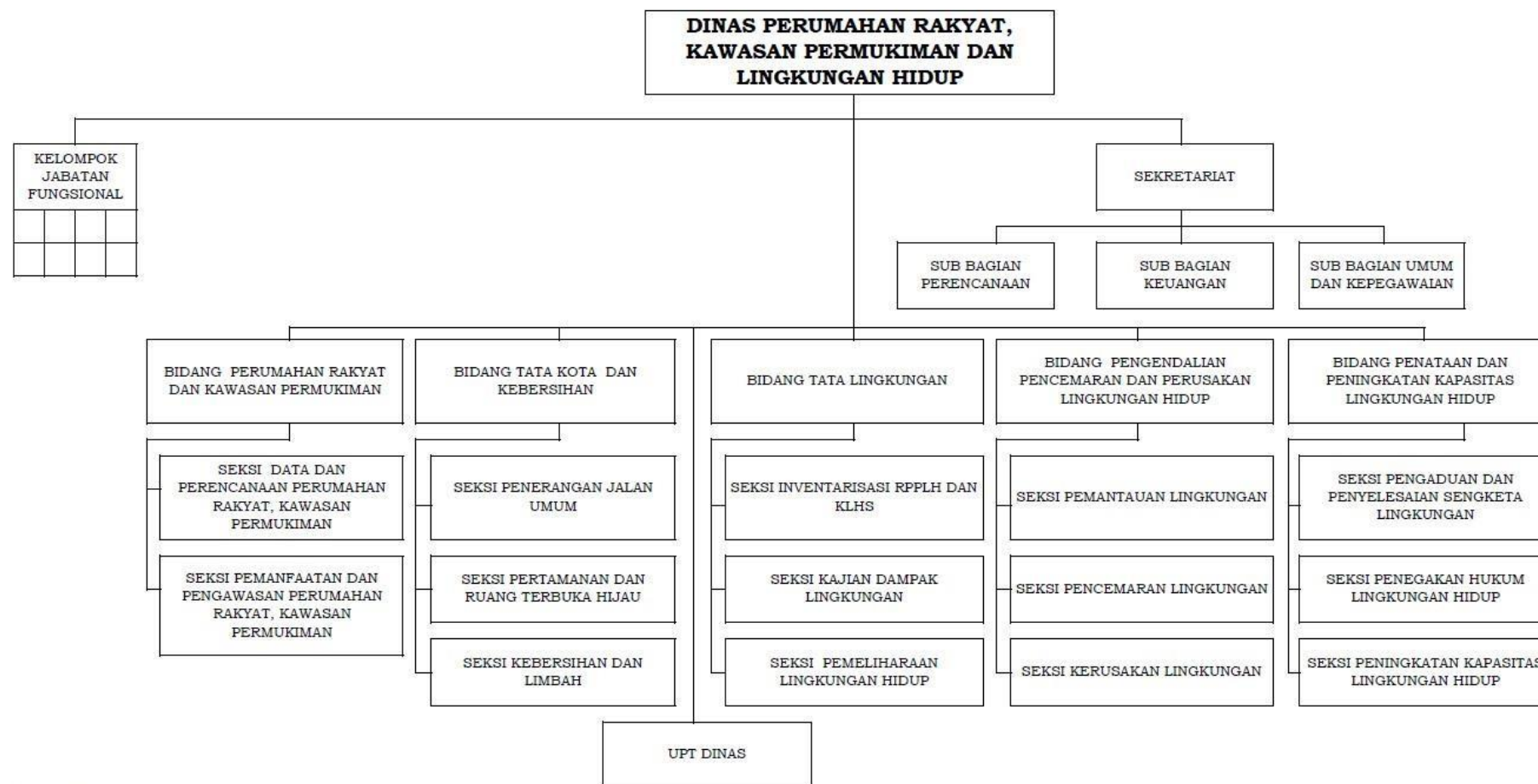
*i) Kelompok Jabatan Fungsional*

## LAPORAN KINERJA DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019

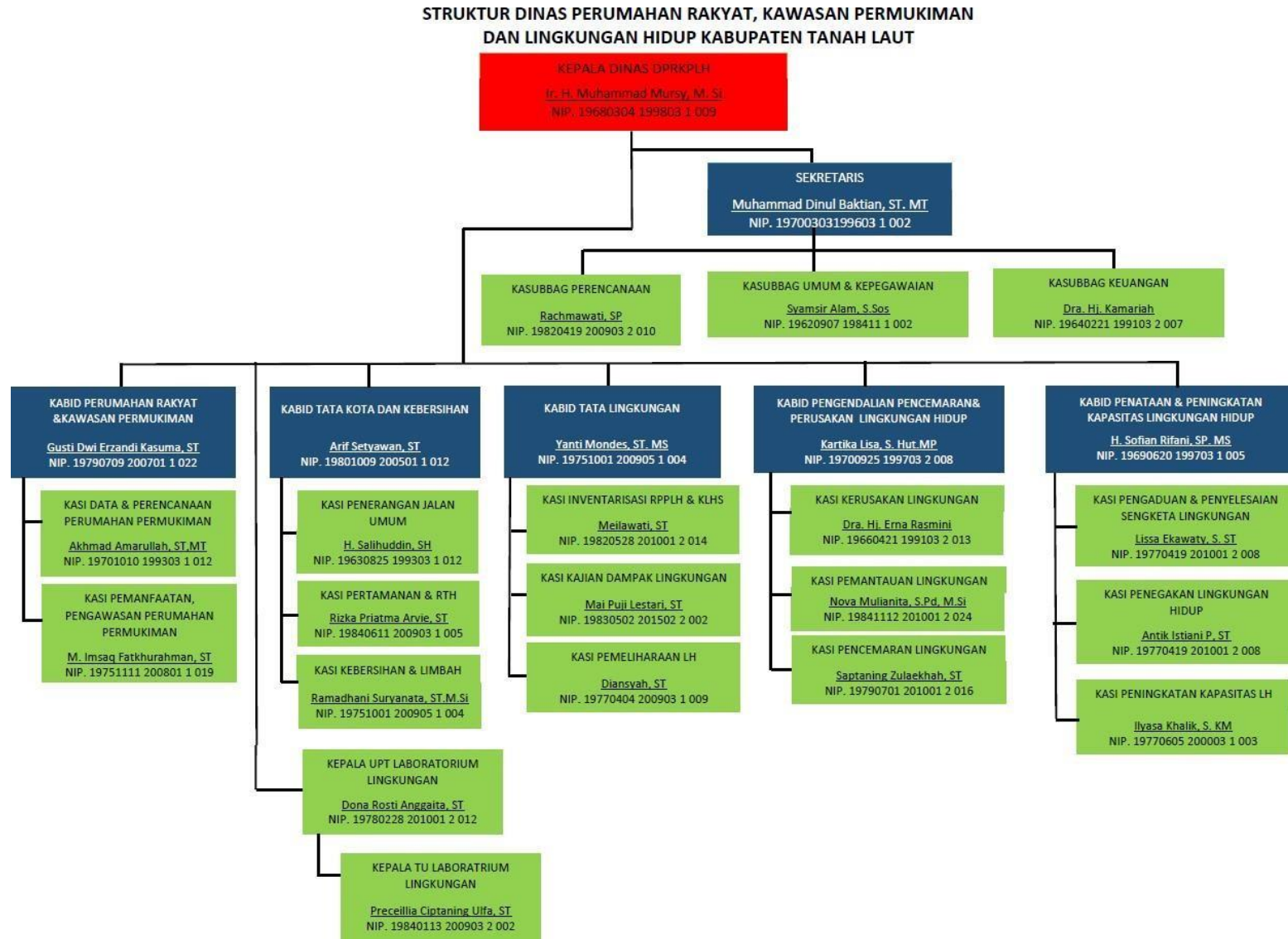
### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

#### DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR :           TAHUN 2016  
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2106



## LAPORAN KINERJA DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019





## LAPORAN KINERJA DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut didukung sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia (personil) serta sarana dan prasarana.

Adapun komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Des. 2019 terdiri atas 65 orang ASN dan 231 orang PTT, seperti dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.

*Komposisi Personil (ASN + PTT) DPRKPLH Tanah Laut per 31 Des. 2019*

No	Personil	Jumlah (org)	%
1.	ASN	65	21,96
2.	PTT	231	78,04
	<b>Jumlah</b>	<b>296</b>	<b>100</b>

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2019

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut per 31 Des. 2019 berdasar tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2.

*Komposisi Personil (ASN + PTT) DPRKPLH Tanah Laut berdasar Tingkat Pendidikan per 31 Des. 2019*

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)	%
1.	SD	11	3,72
2.	SLTP	9	3,04
3.	SLTA	9	3,04
4.	D3	5	1,69
5.	D4/S1	23	7,77
6.	S2	8	2,70
7.	PTT	231	78,04
	<b>Total</b>	<b>296</b>	<b>100</b>

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2019

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan per 31 Des. 2019 dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini

## LAPORAN KINERJA DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019

Tabel 3.

*Komposisi Personil (ASN + PTT) Berdasar Golongan per 31 Des. 2019*

No	Golongan	Jumlah (org)	%
1.	IV	6	2,03
2.	III	31	10,47
3.	II	17	5,74
4.	I	11	3,72
5.	PTT	231	78,04
	<b>Total</b>	<b>296</b>	

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2019

Komposisi sumber daya manusia (personil) DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut berdasarkan formasi jabatan per 31 Des. 2019 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4.

*Komposisi Personil (ASN dan PTT) Berdasar Formasi Jabatan per 31 Des. 2019*

No	Formasi Jabatan	Jumlah (org)	%
1.	IIb	1	0,34
2.	IIIa	1	0,34
3.	IIIb	5	1,69
4.	IVa	18	6,08
5.	IVb	1	0,34
6.	Fungsional Umum	39	13,17
7.	Fungsional Tertentu	0	-
8.	PTT	231	78,04
	<b>Total</b>	<b>296</b>	

Sumber : Umpeg. DPRKPLH Kab. Tanah Laut tahun 2019

**D. Aspek Strategis Organisasi**

Dalam upaya melaksanakan tugas, fungsi dan dalam rangka mengawal pencapaian RPJMD Kab. Tanah Laut, maka Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018-2023.

Setiap program yang disusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk mencapai terwujudnya sasaran strategis organisasi, sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah;
- c) Meningkatnya pelayanan kebersihan, penerangan jalan umum serta keindahan kota;
- d) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan;
- e) Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup;
- f) Meningkatnya pengendalian pencemaran dan pengendalian perusakan lingkungan;
- g) Meningkatnya wilayah bebas pencemaran udara;
- h) Meningkatnya kualitas perumahan layak huni;
- i) Meningkatnya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
- j) Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas prasarana dan sarana Utilitas (PSU);

Berkaitan dengan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, tentu tidak bisa lepas dari permasalahan dan issue strategis yang dihadapi sepanjang tahun 2019, antara lain :

- ✓ Belum sebandingnya antara peningkatan jumlah kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan ketersediaan SDM yang kompeten dalam pemantauan lingkungan & pengendalian pencemaran;

## **LAPORAN KINERJA DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019**

- ✓ Masih terbatasnya SDM dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan hidup;
- ✓ Masih terbatasnya pelayanan pengendalian pencemaran udara dan air;
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan pengaduan dan belum sesuaiya penanganan pengaduan terhadap SOP;
- ✓ Semakin kompleknya permasalahan yang berdampak besar terhadap lingkungan;
- ✓ Masih kurangnya jumlah SDM/ tenaga lapangan baik untuk pengelola sampah maupun yang mengurus pertamanan;
- ✓ Masih kurangnya tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga pada kawasan permukiman;
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU;
- ✓ Kurang berdayanya masyarakat untuk memperbaiki rumah dan;
- ✓ Belum optimalnya penanganan prasarana utilitas (PSU) oleh masyarakat/pengembang.

### **E. Kegiatan dan Produk Organisasi**

Jenis Kegiatan dan Produk Organisasi yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut antara lain :

#### *a) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.*

- ✓ Pengaduan Lingkungan Hidup  
Melakukan fasilitasi pengelolaan pengaduan bidang lingkungan hidup
- ✓ Bank sampah  
Memfasilitasi pembentukan dan memberikan pembinaan kepada Masyarakat / Kelompok yang ingin membentuk Bank Sampah di Kabupaten Tanah Laut.
- ✓ Adipura/Adiwiyata

Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan upaya meraih penghargaan Adipura/Adiwiyata baik secara langsung maupun tidak langsung

*b) Bidang Tata Kota dan Kebersihan*

- ✓ Pelayanan Persampahan :
  - Pelayanan Pengangkutan sampah dari Tempat Penyimpanan Sementara keTempat Pengolahan Akhir (TPA) se Kabupaten Tanah Laut.
  - Pelayanan Penampungan sampah dari masyarakat ke Tempat Pembuangan Sementara Terpadu skala kota Pelaihari
- ✓ Jaringan PJU  
Memberikan pelayanan berupa pemasangan jaringan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemeliharanya se Kabupaten Tanah Laut
- ✓ Pertamanan dan RTH  
Pelayanan pembangunan dan Pemeliharaan Taman dan RTH di kota Pelaihari.
- ✓ Pelayanan Sanitasi, Air Bersih dan Toilet / Lampu Portable
  - Memberikan Pelayanan berupa penyediaan toilet portable dan air bersih dalam rangka mendukung kegiatan masyarakat yang bersifat darurat dan sementara
  - Pelayanan penyediaan penerangan sementara berupa lampu sorot portable dan jaringan penerangan lampu lapangan

*c) Bidang Tata Lingkungan*

- ✓ Dokumen Lingkungan  
Memfasilitasi penyusunan Dokumen lingkungan (Amdal, UKL – UPL, dan SPPL), menyusun dokumen lingkungan (IKPLHD,RPPLH, inventarisasi Gas Rumah Kaca, Program Kampung Iklim)
- ✓ Rekomendasi Ijin PPLH
  - Memberikan rekomendasi ijin PPLH ( Ijin TPS LB3, Ijin IPLC, Ijin Limbah Domestik dan Ijin Land Application (LA) )
- ✓ Mengeluarkan SPPL
- ✓ Mengeluarkan rekomendasi UKL – UPL
- ✓ Mengeluarkan SKKL, Izin Lingkungan

*d) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman*

## **LAPORAN KINERJA DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019**

- ✓ Membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
- ✓ Peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum

### *e) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*

- ✓ Uji Kualitas Air
- ✓ Uji Kualitas Udara Ambient
- ✓ Uji Kadar Polusi Limbah Cair
- ✓ Uji Emisi / Polusi udara akibat aktivitas industry
- ✓ Memberikan informasi status kerusakan lahan untuk produksi biomassa

### *f) UPT Laboratorium Lingkungan Hidup*

- ✓ Pelayanan Pengujian Sampel dari Masyarakat, Perusahaan dan atau Institusi
- ✓ Pelayanan Pengujian Sampel pengaduan kasus lingkungan

## **F. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan LAKIP DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- e) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- g) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023;
- h) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- i) Peraturan Bupati (Perbup) Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

## **G. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut :

### ***Ikhtisar Eksekutif***

#### ***Bab I Pendahuluan***

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Tugas dan Fungsi Organisasi, Struktur Organisasi dan Personil, Aspek Strategis Organisasi, Kegiatan dan Produk Organisasi, Landasan Hukum, dan Sistematika Penyajian.

#### ***Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja***

Menjelaskan secara ringkas Dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 yang meliputi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, Rencana Strategis Dinas



Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

***Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019***

Menjelaskan Analisis Pencapaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian Sasaran Strategis untuk Tahun 2019 termasuk sasaran pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Tanah Laut

***Bab IV Penutup***

Menjelaskan Kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja yang diperlukan bagi perbaikan Kinerja dimasa mendatang.

***Lampiran - lampiran***

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Perencanaan kinerja merupakan titik awal dalam siklus kinerja. Dasar untuk melakukan perencanaan kinerja adalah *perencanaan strategis* yang menetapkan tujuan utama suatu organisasi. Perencanaan strategis (perencanaan jangka panjang) menentukan apa saja yang harus dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dan rencana strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut pada tingkat unit-unit kerja dibawahnya, yaitu perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Perencanaan kinerja mendesain kegiatan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, bagaimana menyediakan sumber daya, dana yang diperlukan, kapan harus dilakukan sehingga tujuan dapat dicapai seperti yang diharapkan.

#### **a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023.**

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan amanat itu melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Tanah Laut dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi serta memperhatikan RPJMN. RPJMD memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum dan Program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD.

1. Pernyataan Visi RPJMD

Visi yang diemban dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 sesuai Perda nomor 2 Tahun 2019 adalah menuju terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI, dengan penjelasan pokok-pokok visi sebagai berikut :

- **BERKARYA** : *Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja, yaitu : secara bersama-sama berkarya mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat;*
- **INOVASI** : *Solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.*
- **TERTATA** : *Bermakna tertib administrasi dan tertib substansi, yaitu pemerintahan yang tertata dan terkelola dengan baik (Good Governance);*
- **RELIGIUS** : *Aktualisasi nilai dan prinsip keagamaan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat;*
- **AKTUAL** : *Pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi dan relevan dengan pihak yang dilayani; dan;*
- **SINERGI** : *Integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi*

2. Pernyataan Misi RPJMD

Untuk mencapai visi RPJMD Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda nomor 2 Tahun 2019, Kabupaten Tanah Laut mengusung 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah, meliputi :

- *berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya ;*
- *menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;*

- *membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);*
- *meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat; dan*
- *membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Sesuai dengan semangat dan jargon pada saat kampanye lalu yaitu **DESA DIBINA KOTA DITATA**, bahwa :

- *Desa Dibina diwujudkan dalam bentuk adanya pembinaan desa sesuai dengan kondisi, karakter dan potensi desa oleh SKPD bersama-sama pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa; dan*
- *Kota Ditata bahwa penataan kota Pelaihari sebagai Ibu Kota Kabupaten Tanah Laut agar menjadi lebih baik dan tertata rapi, kota menjadi lebih indah, asri dan nyaman untuk ditinggali serta meminimalisasi tingkat kekumuhan kota.*

Dalam pelaksanaan pencapaian visi dan misi tersebut di atas, agar seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di Tanah Laut melaksanakannya dengan Motto : *Kerja Keras, Cerdas, Tuntas, Berkualitas dan Ikhlas.*

**b) Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 - 2023**

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintah konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar melaksanakan otonomi daerah dengan berdasar asas-asas tugas pembantuan, Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaanya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota, di biayai oleh APBN, untuk semua urusan wajib dan pilihan dimana didalamnya termasuk urusan Bidang Perumahan Permukiman, Tata Kota dan Lingkungan Hidup, yang menjadi tugas dan

tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu, untuk melaksanakan mandat tersebut perlu disusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

**1. Pernyataan Visi dan Misi Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2023**

Misi 2 : Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif		
Peningkatan Inovasi dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya inovasi pelayanan publik	Peningkatan upaya penerapan inovasi dalam pelayanan publik melalui pola replikasi <i>best practices</i> yang telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan Inovasi di masyarakat dan Pengembangan Industri Kreatif	Meningkatnya penerapan teknologi inovatif di Masyarakat	Peningkatan penerapan inovasi pada sistem produksi di tingkat usaha yang potensial.
	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Peningkatan pengembangan industri kreatif daerah skala kecil dan menengah.
Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )		
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Pembangunan Daerah
		Peningkatan pemanfaatan Data/Informasi berbasis TI untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan
		Peningkatan kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Misi 5 : Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat		
Peningkatan kinerja pembangunan yang berkualitas bidang ekonomi dan sosial budaya (Pembangunan Inklusif)	Meningkatnya kualitas Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan kualitas Perencanaan Pembangunan Inklusif
		Peningkatan Kesempatan Kerja untuk pengurangan ketimpangan dan pengurangan kemiskinan
		Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
		Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya untuk mampu meningkatkan taraf hidupnya.
		Peningkatan Keserasian Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang bermuara pada APBD yang Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, Pro Environment
		Peningkatan sinergi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Terwujudnya pembangunan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dan sumberdaya energi	Meningkatnya Infrastruktur Sosial dan Ekonomi yang berkualitas dan sumberdaya energi	Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan yang meningkatkan interkoneksi antarpusat pertumbuhan
		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya untuk peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah
		pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
		Pengendalian Pemanfaatan Ruang

## LAPORAN KINERJA DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019

Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah	Pengembangan bidang ketenagalistrikan
		Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sesuai potensi daerah
		Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
		Peningkatan kualitas fasilitasi pemasaran produk unggulan daerah
	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan khususnya di wilayah potensial serta peningkatan linkage sektoralnya.	
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya ketahanan pangan	Peningkatan Ketahan Pangan untuk penguatan cadangan pangan serta desa berketahanan pangan
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Upaya Membangun Desa, Menata Kota	Meningkatnya Desa Membangun	Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Desa untuk mendukung gerakan desa membangun.
	Meningkatnya Cakupan Penataan Perkotaan	Peningkatan keserasian Perencanaan Pengembangan Kota-kota

### B. Tujuan

Tujuan perencanaan kinerja DPRKPLH dalam priode 2018 - 2023 adalah :

1. *Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman;*
2. *Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan pencemaran lingkungan;*
3. *Terwujudnya rumah sehat dan layak huni;*
4. *Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien*

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Renstra		Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab / Sumber Data	Penjelasan Rumus
1.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	1.	Diraihnya penghargaan kebersihan dan sekolah berwawasan lingkungan pada tahun n	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	$\Sigma$ Penghargaan adipura dan adiwiyata yang diperoleh pada tahun n
		2.	Indeks Kualitas Air	Bidang Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	$PI_1 = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_1}{I_{10}M}\right)^2 + \left(\frac{C_2}{I_{10}R}\right)^2}}{2}$
		3.	Indeks Kualitas udara ambient		Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$
		4.	Prosentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	Bidang Tata Kota dan Kebersihan	$\Sigma$ titik jaringan yang terpasang / $\Sigma$ Luas wilayah permukiman x 100%
		5.	Prosentase RTH yang terbangun		$\Sigma$ RTH yang terbangun / $\Sigma$ Luas RTH x 100%
2.	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	1	Persentase rumah layak huni	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	$\Sigma$ rumah layak huni / $\Sigma$ rumah tidak layak huni di Tala x 100%

Kepala Dinas Perkim dan LH  
Kabupaten Tanah Laut,

Ir. H. Muhammad Mursy, M.Si  
Nip. 19680304 199803 1 009



**D. Sasaran Strategis**

Sasaran dalam perencanaan kinerja DPRKPLH dalam priode 2018 –2023 adalah :

1. *Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan*
2. *Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup*
3. *Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan*
4. *Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah*
5. *Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR)*
6. *Meningkatnya Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU)*
7. *Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup*
8. *Meningkatnya pelayanan kebersihan, kenyamanan jalan umum dan keindahan*
9. *Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan*
10. *Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana kantor.*
11. *Meningkatnya Tata Keloal Administrasi Umum dan Kepegawaian*

Tabel 6  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	SASARAN	INDIKATOR	TRANSISI 2018	Target Kinerja Sasaran Pada				
							2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman	Diperoleh penghargaan Adipura	Diperolehnya penghargaan Setiap Tahun	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun n	1 (Adipura danAdiwiyata) 100%	1 (Adipura danAdiwiyata) 100%	1 (Adipura danAdiwiyata) 100%	1 (Adipura danAdiwiyata) 100%	1 (Adipura danAdiwiyata) 100%	1 (Adipura danAdiwiyata) 100%
		Kondisi Kualitas Air	Sesuai Baku Mutu		Indeks kualitas air	50	50,25	50,5	50,75	51	51
		Kondisi Kualitas Udara Ambient	Sesuai Baku Mutu		Indeks kualitas udara ambient	86	87	87,25	87,5	87,75	87,75
		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	800%		Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	71,06%	71,06%	72%	73,5%	75%	80%
		Penyebaran sarana dan prasarana dalam pemenuhan kualitas lingkungan perkotaan	60%		Persentase RTH yang terbangun	36,40%	36,40%	37,50%	40,50%	45,5%	60%

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

		Terbentuk 50 Unit BS. Setahun	40 BS	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	50% 25 BS	60% 30BS	70% 35BS	80% 40 BS	90% 45BS	100% 50 BS
		Persentase kawasan perumahan fasilitas PSU	100%	Meningkatnya Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	Persentase kawasan perumahan fasilitas PSU	100	100	100	100	100	100
		Persentase Penyebaran sarana publik yang terang di perkotaan	89,72%	Meningkatnya pelayanan kebersihan, kenyamanan jalan umum dan keindahan	1. Persentase sarana publik yang terang	55,96%	68,44%	73,76%	79,08%	84,4%	89,72%
		Persentase Penyebaran sarana kebersihan, PJU & Pertamanan	79%		2. Persentase kebersihan kenyamanan jalan umum serta keindahan	72,94%	76,44%	76,5%	77,5%	78,6%	79%
2	Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	58,45	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	1. Persentase dokumen lingkungan hidup	15	35	95	109	109	109

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

					2. Persentase kampung iklim yang terbina	0	1	4	7	7	7
					3. Persentase dokumen kajian Lingkungan hidup	2	2 (20%)	2 (40%)	2 (60%)	2 (80%)	2 (100%)
					4. Persentase Pertimbangan teknis izin PPLH	10	15	15	15	15	15

		Terselesaikan nya 10 Kasus Lingkungan	8 80%	Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	20%	20%	40%	60%	80%	100%
		90 Perusahaan Taat	75 90%	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap aturan	16%	30%	50%	60%	80%	100%
		Kondisi Kualitas Air dan Udara Ambient	Sesuai Baku Mutu	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu 2. Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu 3. Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	80,71	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00
		Kondisi Air Limbah dan Emisi/Polusi Udara	Sesuai Baku Mutu			91,43	91,50	91,75	92,00	92,25	92,50
		Kondisi Kerusakan Lahan	Sesuai Baku Mutu			100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya rumah sehat dan layak huni	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	100%	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100%	Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR)	Persentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

		Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	30%	Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	Persentase (jumlah) Penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana	0	0	0	30	30	30
4	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib ,efektif dan efisien			Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	64,11 (B)	70,4	75,00	80,00	85,00	90,00
				Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase saranan dan prasarana yang dikelola sesuai standar	84,11	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya adminitrasiumum dan kepegawaian Dengan baik dan tepat waktu	68,45 100%	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2018 - 2023

Indikator Kinerja Utama dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut merupakan rencana dari sasaran capaian kinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun Pemerintahan Kepala Daerah terpilih yaitu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ini di gunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan Tujuan dan Sasaran Strategisnya sebagaimana dapat dilihat pada *Tabel 6 Sasaran Startegis sesuai Renstra* .

#### **E. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Belanja Langsung yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah :

##### *1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Kegiatan :

- a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
- c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional.
- d) Penyediaan jasa administrasi keuangan.
- e) Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- f) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- g) Penyediaan alat tulis kantor.
- h) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- i) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- j) Penyediaan makanan dan minuman.
- k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.



- l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah
- m) Penyediaan jasa penunjang SKPD

*2. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*

Kegiatan :

- a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

*3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan*

Kegiatan :

- a) Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
- b) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- c) Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan.
- d) Peningkatan Kemampuan aparat pengelola persampahan
- e) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)

*4. Program Pengembangan Perumahan*

- a) Penetapan kebijakan , strategi dan program perumahan

*5. Program lingkungan sehat perumahan*

- a) Peningkatan rumah sederhana
- b) Peningkatan rumah sederhana (DAK)

*6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.*

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan penilaian kota sehat/Adipura.
- b) Pemantauan Kualitas Lingkungan.
- c) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup.
- d) Pengelolaan B3 dan Limbah B3.

- e) Pengkajian dampak lingkungan.
- f) Penyusunan AMDAL
- g) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.
- h) Pengembangan Laboratorium Lingkungan.
- i) Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan.
- j) Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup
- k) Pengujian dan Pelayanan Laboratorium Lingkungan (DAK)

*7. Program perlindungan dan konservasi SDA*

Kegiatan :

- a) Pengendalian dampak perubahan iklim

*8. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media*

Kegiatan :

- a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

*9. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan asset daerah*

Kegiatan :

- a) Penyusunan tabulasi data asset tetap

*10. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup*

Kegiatan :

- a) Pengembangan data dan informasi lingkungan

*11. Program Peningkatan Pengendalian Polusi*

Kegiatan :

- a) Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri.
- b) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair.

*12. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan*

Kegiatan :

- a) Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.
- b) Rehabilitasi / pemeliharaan jalan lingkungan.

*13. Program Peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota*

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum
- b) Penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota

**F. Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2019 merupakan gambaran Kinerja tahun 2019. Penetapan Kinerja ini mengacu pada Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dengan target Tahunan yaitu Tahun Keempat RPJMD. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama.

PerjanjianKinerja/Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan Renstra dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7  
Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2019  
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target
				2019
1	Terwujudnya kota yang indah, bersih dan nyaman	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	Penghargaan kebersihan pada tahun	2 (Adipura dan Adiwiyata) 100%
			Indeks kualitas air	50,25
			Indeks kualitas udara ambient	87
			Persentase penyebaran jaringan penerangan di wilayah permukiman	71,06%
			Persentase RTH yang terbangun	36,40%
		Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah	Persentase bank sampah dimasyarakat/ sekolah	60% 30BS

		Meningkatnya Kawasan Perumahan yang telah terpenuhi Fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	Persentase kawasan perumahan fasilitas PSU	100
		Meningkatnya pelayanan kebersihan, kenyamanan jalan umum dan keindahan	1. Persentase sarana publik yang terang	68,44%
			2. Persentase kebersihan kenyamanan jalan umum serta keindahan	76,44%
2	Terwujudnya kualitas lingkungan yang sehat dan menurunnya kerusakan	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	1. .Persentase dokumen lingkungan hidup	35
			2. .Persentase kampung iklim yang terbina	1
			3.Persentase dokumen kajian Lingkungan hidup	2 (20%)
			4. .Persentase Pertimbangan teknis izin PPLH	15
		Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	20%

		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap aturan	30%%
		Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	1. Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu	81,00
			2. Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu	91,50
			3. Persentase parameter kerusakan lahan untuk produksi biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis	100
3	Terwujudnya rumah sehat dan layak huni	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	Persentase berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	100
		Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR)	Persentase rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	100%

Sumber : Renstra Dinas Kawasan Permukiman dan 2018 - 2023			Meningkatnya Rumah layak huni bagi korban Bencana	Persentase (jumlah) Penyediaan rumah layak huni bagi korban Bencana	0	Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup Tahun
	4	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib ,efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan	Nilai SAKIP SKPD	70,4	
			Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana kantor	Persentase saranan dan prasarana yang dikelola sesuai standar	100	
			Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase terkelolanya adminitrasiumum dan kepegawaian dengan baik dan tepat waktu	100	





**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH LAUT**

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban dalam menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang dalam menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. Pengelompokan penilaian capaian kinerja dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini:

*Tabel 8  
Interprestasi Capaian Kinerja*

No	Capaian Kinerja	Interpretasi	Warna
1	>100%	Melebihi/ melampaui Target	
2	= 100%	Sesuai Target	
3	< 100%	Belum Mencapai Target	

Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan prosentase capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Akuntabilitas kinerja dapat memberikan informasi yang lebih transparan terkait sebab-sebab tercapai atau tidak nya capaian kinerja, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2019.

Dan guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada tabel 9 berikut :

*Tabel 9*  
*Skala Nilai Peringkat Kinerja*

No	Capaian Kinerja	Interpretasi	Warna
1	$\geq 91$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

*Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010*

#### A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

## 1. Target dan Capaian IKU (Tabel)

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dan sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian seperti pada tabel 10 berikut :

*Tabel 10*  
*Target dan Capaian IKU 2019*

No	Sasaran Renstra		Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	1.	Penghargaan Kebersihan pada tahun 2019	Penghargaan Adipura dan Adiwiyata (2)	Diraihnya Penghargaan P1 Adipura Tingkat Provinsi dan Penghargaan Adiwiyata Tingkat Nasional
		2.	Indeks Kualitas Air	50,25 %	50 %
		3.	Indeks Kualitas Udara Ambient	87 %	90,68 %
		4.	Persentase Penyebaran Jaringan Penerangan di Wilayah Permukiman	71,06 %	100 %
		5.	Persentase RTH yang terbangun	36,4 %	10,93 %
2.	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	1	Persentase berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	100% (628) Unit Rumah	99% 619 Unit Rumah

Sumber : Realisasi kegiatan DPRKPLH dan Renstra DPRKPLH 2018-2023

Didalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 2018 - 2023 terdapat 2 (dua) *sasaran strategis* yang diukur melalui 6 (enam) indikator. Dan berdasarkan tabel 10 di atas dapat disampaikan bahwa ada 2 (dua) indikator yang ditetapkan pada tahun 2019 telah mencapai target dan ada 3 (tiga) indikator yang belum bisa tercapai yaitu , *indeks kualitas air (target 50,25% : realisasi 50%)*, *prosetase RTH yang terbangun (target 36,4% : realisasi 10,93%)*, *prosentase berkurangnya kawasan kumuh perkotaan (target 100% : realisasi 99%)*.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya seperti tabel 11. Dan tingkat capaian kinerja IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2019 sebesar 94,70 % (sangat tinggi), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran yang didapat dari tabel 11.

$$(99,50\% + 104,23 \% + 140,73 \% + 30,03 \% + 99 \%) / 5 = 94,70 \%$$

LAPORAN KINERJA DPRKPLH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019

Tabel 11  
Capaian Kinerja DPRKPLH 2019

No	Sasaran Renstra		Indikator Kinerja Utama	Target	realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	1.	Penghargaan Kebersihan	2	2	100%
		2.	Indeks Kualitas Air	50,25 %	50 %	99,50 %
		3.	Indeks Kualitas Udara Ambient	87 %	90,68 %	104,23 %
		4.	Persentase Penyebaran Jaringan Penerangan di Wilayah Permukiman	71,06 %	100 %	140,73 %
		5.	Persentase RTH yang terbangun	36,4 %	10,93 %	30,03 %
2.	Meningkatnya kualitas perumahan layak huni	1	Persentase berkurangnya kawasan kumuh perkotaan	100% (628) Unit Rumah	99% 619 Unit Rumah	99,00 %

## 2. Uraian dan Analisa Capaian IKU

### *Capaian Sasaran 1*

*Meningkatnya Kualitas Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan*

#### **Indikator 1 : Penghargaan Kebersihan pada tahun 2019**

Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan penilaian Adipura P1 dan berdasarkan hasil penilaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendapatkan penghargaan tingkat provinsi sementara untuk penghargaan Adipura Tingkat Nasional masih menunggu hasil penilaian akhir oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan untuk Adiwiyata Tingkat Nasional Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berhasil mendapatkannya melalui SMAN 1 Kintap.

Untuk mendukung capaian target Indikator ini (Penghargaan kebersihan) telah didukung melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kota Sehat/Adipura Kabupaten dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 431.464.800 namun hanya terealisasi sebesar Rp. 117.094.800 atau 44,00%.

Dalam memperoleh penghargaan adipura didukung oleh 149 petugas kebersihan 23 orang petugas pertamanan dan 29 orang petugas PJU yang tersebar di berapa kecamatan, Selain kegiatan yang dilakukan oleh petugas kebersihan DPRKPLH juga melakukan kegiatan buatan bank sampah sebanyak 31 Bank sampah yang tersebar di beberapa kecamatan.

Untuk mendukung diperolehnya Penghargaan Lingkungan kegiatan yang dilakukan adalah :

- ✓ *Membuat Bank Sampah setiap Kecamatan*
- ✓ *Membuatnya kelompok sadar lingkungan di masyarakat perkecamatan*
- ✓ *Inovasi pengolahan sampah berupa pengolahan sampah menjadi pupuk padat menjadi pupuk organik cair selain itu melakukan inovasi berupa olah limbah industri menjadi pakan ternak*
- ✓ *Penambahan armada untuk pengangkutan sampah dari Tempat Penyimpanan Sementara ke Tempat Pengolahan Akhir dari dana APBD sebanyak 1 unit dan dari hadiah adipura sebanyak 1 unit*

- ✓ *Penambahan Tenaga Tidak Tetap untuk kegiatan kebersihan di Kabupaten Tanah Laut.*



*Tabel Bank sampah yang ada di Tanah Laut*

<i>No</i>	<i>Lokasi</i>	<i>Jumlah</i>
1	<i>Kec. Pelaihari</i>	16
2	<i>Kec. Bajuin</i>	3
3	<i>Kec. Bati-bati</i>	3
4	<i>Kec. Takisung</i>	1
5	<i>Kec. Kintap</i>	2
6	<i>Kec. Tamban Ulang</i>	2
7	<i>Kec. Batakan</i>	1
8	<i>Kec. Jorong</i>	1
9	<i>Kec. Panyipatan</i>	2

Kendala- kendala yang dihadapi dalam peroleh menghadapi pelaksanaan perolehan Adipura antara lain :

1. Masih kurangnya Tempat Penyimpanan Sementara di setiap permukiman
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan dengan pengurangan sampah plastik

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

1. Penyediaan Tempat Penyimpanan Sementara di setiap permukiman
2. Sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kebersihan lingkungan dengan pengurangan sampah plastik

Data perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel 12

*Tabel 12*  
*Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Kab. Tala Tahun 2013-2019*

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
1	Kantor Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2012
2	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2013
3	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2014
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH	Piala Adipura	KLHK	2017
5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH	Piala Adipura	KLHK	2018
6	Bank Sampah Alfath (Fathurrahman)	Penghargaan Pemuda Penggerak Pembangunan Bidang Lingkungan	Dispora Tanah Laut	2017



Tabel 12 (lanjutan..)  
Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup Kab. Tala Tahun 2013-2019

7	SDN Atu Atu	Adiwiyata Mandiri	KLHK	2015
8	SMKPP Tanah Laut	Adiwiyata Mandiri	KLHK	2017
9	SDN Angsau 4	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
10	SDN Pabahanan	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
11	SMPN 1 Pelaihari	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
12	SMK1 Pelaihari	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
13	SMA 1 Jorong	Adiwiyata Nasional	KLHK	2017
14	SMP1 Batu Ampar	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2018
15	SMP 5 Pelaihari	Adiwiyata Propinsi	DLH Propinsi	2018
16	SMAN 1 Kintap	Adiwiyata Nasional	KLHK	2019
17	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH	Penghargaan Adipura P1	Provinsi	2019
18	Bank sampah Multi Madya, BS Panggung Berseri, BS Bersih Indah	Penghargaan Bank Sampah Tingkat Provinsi	Provinsi	2019

Sumber : DPRKPLH Tanah Laut tahun 2019

No.	Nama	Nama	Pemberi	Tahun
		Penghargaan	Penghargaan	Penghargaan
	Orang/Kelompok/Organisasi			
1	Kantor Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2012
2	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2013
3	Badan Lingkungan Hidup Tanah Laut	Piala Adipura	KLH	2014
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH	Piala Adipura	KLHK	2017
5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH	Piala Adipura	KLHK	2018
6	Bank Sampah Alfath (Fathurrahman)	Penghargaan	Dispora Tanah	2017
		Pemuda	Laut	
		Penggerak		
		Pembangunan		
		Bidang		
		Lingkungan		

**Indikator 2 : Indeks Kualitas Air**

Pada tahun 2019 melalui program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan kegiatannya Pemantauan Kualitas Lingkungan telah dilaksanakan kegiatan pengambilan dan pengujian sampel kualitas air melalui laboratorium terakreditasi.

Dari hasil pemantauan kualitas air, diperoleh perhitungan Indeks Kualitas Air dengan perbandingan dari tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Hasil Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 13 berikut :

*Tabel 13  
Indeks Kualitas Air Kab. Tanah Laut*

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Target</b>	45,56	50,00	50,00	50,25
<b>Capaian</b>	49	50	51	50

*Sumber : Bidang P3LH DPRKPLH Tahun 2019*

Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada 4 lokasi sungai yaitu :

- ✓ Sungai Tabunio
- ✓ Sungai Kintap
- ✓ Sungai Asam-Asam
- ✓ Sungai Maluka

### Photo Visual Kegiatan Pengambilan Sampel



### *Pengambilan Sampel Air Sungai Asam-Asam*



*Pengambilan Sampel Air Sungai Tabunio*



*Pengambilan Sampel Air Sungai Kintap*



*Pengambilan Sampel Air Sungai Maluka*

Pada Tahun 2019 target Indeks Kualitas Air Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai adalah 50,25 sedangkan hasil yang dicapai 50,00. Dengan demikian indeks kualitas Air belum berhasil memenuhi target. Hal ini dikarenakan musim kemarau tahun 2019 lebih ekstrim dari tahun sebelumnya sehingga debit air sungai berkurang serta masuknya air laut di daerah titik sampel hilir sungai turut mempengaruhi kondisi parameter yang diuji.

Kendala dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- ✓ *UPT. Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Laut masih dalam proses akreditasi*
- ✓ *Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel*
- ✓ *Antrian jadwal pengujian di laboratorium yang terlalu lama*
- ✓ *Akses menuju lokasi pengambilan sampel cukup sulit*

Solusi yang akan dilakukan untuk peningkatan kualitas air di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

- ✓ *Perlu adanya regulasi daerah yang mengatur batas maksimal debit air limbah yang boleh dikeluarkan ke badan air.*
- ✓ *Sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat agar mengolah air limbah sebelum dibuang ke badan air*
- ✓ *Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas air*

Rencana aksi yang dilakukan:

- ✓ Aksi bersih sungai
- ✓ Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas air

**Indikator 3 : Indeks Kualitas udara ambient**

Tahun 2019, melalui Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, dengan Kegiatannya Pemantauan Kualitas Lingkungan telah dilaksanakan kegiatan pemantauan dan pengujian kualitas udara ambient dengan metode *passive sampler* dengan jumlah dana sebesar 253.035.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 239.045.100,- atau 94,47 %.

Hasil Indeks Kualitas Udara Ambient Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel 14.

*Tabel 14*  
*Indeks Kualitas Udara Ambient*

<b>Tahun</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Target</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>89</b>
<b>Realisasi</b>	88,63	95,81	90,88	90,68

*Sumber : Bidang P3LH DPRKPLH 2019*

Pada Tahun 2019 target Indeks Kualitas Udara Ambient Kabupaten Tanah Laut yang ingin dicapai adalah 86, hasil yang dicapai 90,68. Dengan demikian indeks kualitas udara ambient dikatakan telah berhasil tercapai melebihi target.

Angka Indeks Kualitas Udara diperoleh dari perhitungan indeks kualitas udara yang mengadopsi EU Directives yaitu membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar EU Directives (*sumber: IKLH Indonesia, 2014*) .



$$\text{Persamaan Indeks Udara IKLH} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

*Keterangan Rumus :*

*Ieu = rata rata (SO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi SO<sub>2</sub> Ref EU, dan NO<sub>2</sub> hasil pemantauan dibagi NO<sub>2</sub> Ref EU).*

Indeks kualitas Udara merupakan hasil dari pemantauan kualitas udara dengan parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>.

*Kriteria 4 lokasi pengambilan sample udara ambient*

✓ **Transportasi**

*Lokasi di daerah transportasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh dampak emisi gas buang yang keluar dari kendaraan bermotor terhadap kualitas udara di sekitar jalan raya yang dilakukan pemantauan kualitas udaranya. Jarak titik pengambilan sampel kurang lebih 5 – 10 meter dari bahu jalan.*

✓ **Industri**

*Lokasi di daerah industri adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan industri memberikan kontribusi terhadap pencemaran udara disekitar kegiatan industri. Jarak pemantauan tidak terlalu dekat dengan sumber emisi minimal 15 meter dari sumber*

✓ **Pemukiman**

*Lokasi di daerah pemukiman dipilih untuk mengetahui tingkat pencemaran udara yang diakibatkan oleh adanya emisi gas buang yang keluar dari kegiatan disekitar pemukiman padat.*

✓ **Perkantoran/pasar/komersial**

*Lokasi di daerah perkantoran/komersil adalah untuk mengetahui tingkat pencemaran udara di wilayah perkantoran/komersil akibat adanya emisi terutama bersumber dari aktivitas yang ada disekitar lokasi atau kawasan padat perkantoran/pasar/komersil.*

Pemantauan kualitas udara ambient dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, mewakili musim kemarau dan penghujan (sekitar April dan Agustus). Pemasangan Alat ukur kualitas udara dengan menggunakan metode passive sampler dilakukan pada 4 lokasi mewakili yaitu :



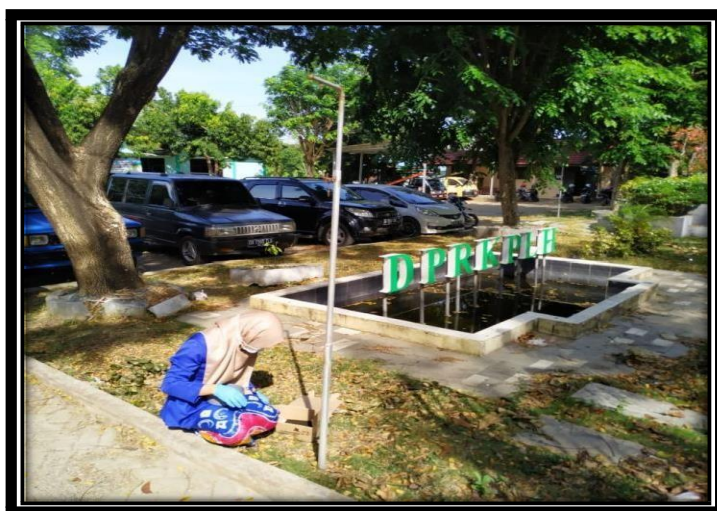
- ✓ Perkantoran (di depan DPRKPLH)
- ✓ Padat Transportasi (Jl. A. Syairani)
- ✓ Industri (PT. Indofood)
- ✓ Pemukiman (Komplek Puri Anggoro, Angsau)



*Pemantauan Kualitas Udara di kawasan Industri (PT. Indofood)*



*Pemantauan Kualitas Udara di Padat Transportasi (Jl. A. Syairani)*



*Pemantauan Kualitas Udara di Perkantoran (didepan DPRKPLH)*

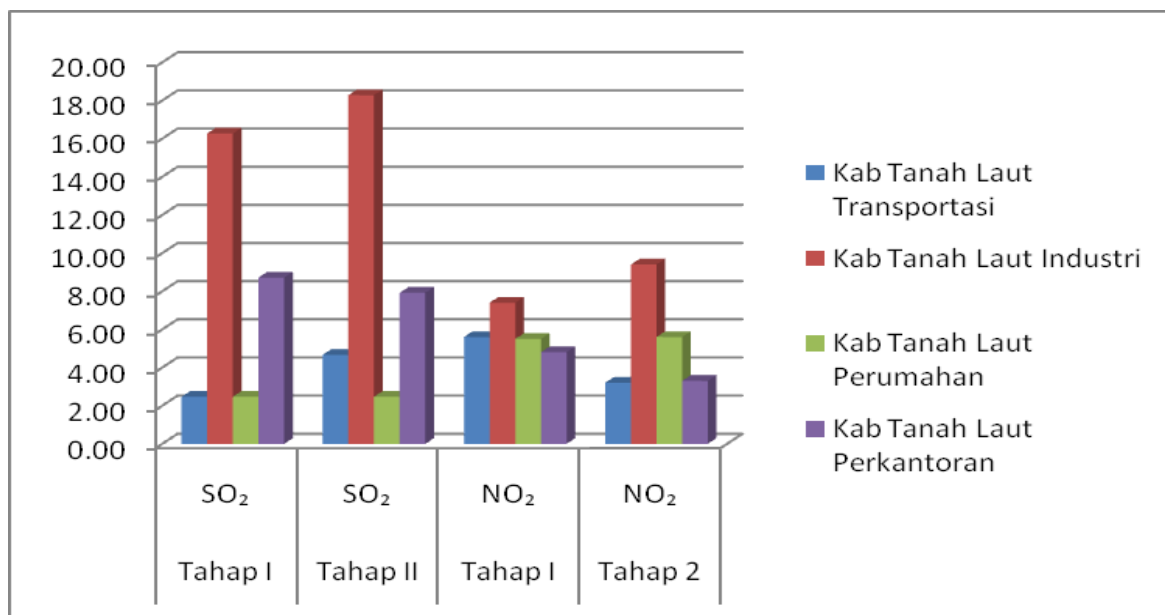


*Pemantauan Kualitas Udara di Pemukiman  
(Komplek Puri Anggoro, Angsau)*

Pemasangan alat dilakukan pada hari yang sama di 4 titik pantau, kemudian akan diambil kembali setelah dipaparkan selama 14 hari.

Hasil Pemantauan Kualitas Udara Kab. Tanah laut Tahun 2019 selama 2 tahap dapat dilihat pada tabel 15 dan tabel 16 berikut :

*Tabel 15  
Indeks Kualitas Udara Ambient Kab. Tanah Laut 2019*



*Tabel 16  
Indeks Kualitas Udara Ambient Kab. Tanah Laut 2019*

Parameter	Rerata Pemantauan	Referensi EU	Index
-----------	-------------------	--------------	-------

<b>NO2</b>	5.60	40.00	0.14
<b>SO2</b>	7.91	20.00	0.40
<b>Index Udara</b>			0.27
<b>Index Udara IKLH</b>			90.68

Sumber : Bidang P3LH DPRKPLH 2019

Kendala dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- ✓ *Belum terakreditasinya UPT. Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk parameter udara ambient.*
- ✓ *Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel*
- ✓ *Antrian jadwal pengujian di laboratorium yang terlalu lama*

Solusi yang akan dilakukan untuk peningkatan kualitas udara di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

- ✓ *Perlu adanya penambahan luasan RTH.*
- ✓ *Pengendalian emisi dari sumbernya (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak)*
- ✓ *Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas udara ambient*

Rencana aksi :

- ✓ *Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas udara ambient.*

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melalui *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota* memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi masalah fasilitas penerangan jalan guna di Kabupaten Tanah Laut. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota* ini melalui kegiatan *pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum* memiliki pagu anggaran Rp. 12.610.596.600,- dimana realisasi anggaran di tahun 2019 ini sebesar Rp.10.213.064.779,- (80,99%) akibat adanya rasionalisasi anggaran sehingga target tetap tercapai yaitu target 2264 titik dan realisasi 2334 titik (103%) dengan sisa anggaran Rp. 2.397.531.821,-

**Indikator 4 : Persentase Penyebaran Jaringan Penerangan di Wilayah Permukiman**

*Tabel 17*  
*Penyebaran Jaringan Penerangan*

No	Target penyebaran jaringan 2019	Realisasi penyebaran jaringan 2019	Realisasi penyebaran jaringan Tahun 2018	Persentase Capaian
1	2264 titik	2334 titik	1083 titik	103 %
<b>Total</b>	±15.000 titik	10729 titik	8395 titik	71,52%

*Sumber : Bidang Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH 2019*

Seiring meningkatnya perkembangan pemukiman, semakin meningkat pula keinginan untuk pemasangan penerangan/ lampu jalan umum, sesuai dengan permintaan masyarakat Kabupaten Tanah Laut

Dampak yang ditimbulkan jika tidak terpasangnya penerangan jalan umum adalah meningkatnya terjadinya kecelakaan di jalan dan tindak kriminal. Untuk itu perlu adanya penerangan jalan umum untuk kepentingan masyarakat.

Kegiatan pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum ini memiliki sasaran pada aspek :

- ✓ *Meningkatnya penerangan jalan umum untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut*
- ✓ *Dengan adanya pemasangan penerangan jalan umum maka perlunya pemeliharaan yang telah dipasang oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut`*

*Tabel 18*  
*Pemasangan jaringan Tahun 2019*

No.	Kecamatan	Jumlah	Keterangan
1	Bumi Mkamur	257	PJU
2	Takisung	300	PJU
		4	Lampu Sorot
3	Bati-Bati	182	PJU
		1	Lampu Sorot
4	Pelaihari	251	PJU
5	Jorong	372	PJU
6	Bajuin	182	PJU
7	Batu Ampar	278	PJU
		1	Lampu Sorot
8	Kintap	296	PJU
		4	Lampu Sorot
9	Tambang Ulang	20	PJU
10	Kurau	22	PJU

Sumber : Bidang Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH 2019



*Photo Visual Kegiatan Pemeliharaan dan Pemasangan PJU*



Kendala dalam rangka pemasangan penerangan jalan umum untuk masyarakat antara lain :

Kendala –kendala dalam rangka pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum antara lain :

- 1) Masih ada beberapa permukiman yang belum mendapatkan jaringan listrik dari PLN dan masih merupakan jaringan swadaya masyarakat setempat, mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemasangan jaringan PJU
- 2) Antara pemukiman satu dengan lainnya berjauhan sehingga membutuhkan material dan kebutuhan biaya yang banyak untuk menyambungkan jaringan PJU yang ada.
- 3) Masih banyak permintaan pemasangan jaringan PJU dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan dan dipenuhi.
- 4) Masih terbatasnya petugas dan sarana pendukung operasional pemeliharaan dan pemasangan jaringan PJU, mengakibatkan sering terlambatnya perbaikan dan pelayanan bagi masyarakat (jumlah sarana prasana dan petugas operasional tidak sebanding dengan jumlah titik lampu yang dipelihara).

Solusi untuk kegiatan ini antara lain :

- 1) Perlunya kerjasama yang baik dengan pihak penyedia jaringan listrik yaitu PLN dalam hal penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat secara merata.
- 2) Perencanaan ulang mengenai pemasangan jaringan PJU, sehingga penyebaran PJU bisa merata dinikmati oleh masyarakat, salah satunya dengan pembagian jaringan dengan meterisasi.
- 3) Alokasi dana yang cukup dari pemerintah daerah untuk pemerataan pemasangan jaringan PJU berdasarkan usulan masyarakat yang masuk.
- 4) Perlunya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional PJU.

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

1. Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak PLN dalam hal pemasangan, pemeliharaan dan pemerataan jaringan listrik bagi masyarakat.

Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum

**Indikator 5 : Persentase RTH yang terbangun**

Untuk mencapai indikator ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Tata Kota dan Kebersihan telah melaksanakan program *Peningkatan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota* lewat kegiatan *Penyediaan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.330.430.844,- dan dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.149.501.700,- atau 86,40%

Seiring tumbuhnya perkembangan kota, semakin meningkat pula kebutuhan akan ruang-ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berkumpul, berolahraga, berekreasi, dan bersosialisasi. Untuk itu perlu dibuat wadah guna memfasilitasi kegiatan tersebut berupa ruang terbuka, baik ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka biasa. Sesuai UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.

Tabel 19  
Perbandingan RTH di Kota Pelaihari Dengan Undang-Undang

Luas RTH sesuai Undang- Undang	Target Tahun 2019	Realisasi	Persentase Capaian
450 Ha (30% dari luas wilayah)	0 Ha	0 Ha	0

Sumber : Bidang Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH 2019

Untuk keindahan dan kenyamanan lingkungan dilakukan oleh masyarakat perkotaan seperti sudah mulai sadarnya masyarakat untuk menjaga dan memelihara taman-taman yang ada di kota. Untuk luasan dan jumlah taman di kota Pelaihari sebesar 164 Ha atau sekitar 44% dari luas wilayah kota. Ditahun 2019 tidak ada penambahan RTH di Kota pelaihari dan hanya dilaksanakan pemeliharaan fasilitas penunjang Taman dan RTH.

Di Kabupaten Tanah Laut, taman menjadi sebuah ikon yang sangat penting dalam perkembangan kota, sebagai daya tarik dan cerminan dari sebuah wilayah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Tata Kota dan Kebersihan pada Seksi Pertamanan dan Ruang



Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut, adapun penambahan luasan adalah sebagai berikut :

*Tabel 20*  
*Perluasan Taman/ RTH*

No	Kec/Kel/Desa	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kecamatan Pelaihari	159 Ha	163 Ha	164 Ha	164 Ha	164 Ha	164 Ha

*Sumber : Bidang Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH 2019*



*Taman Mina Tirta*



*RTH Kijang Mas Permai*



Taman TALA Membangun



RTH Kijang Kencana

Dalam rangka mencapai indikator ini masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah :

1. Masih kurangnya lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga untuk mencapai 30% luas Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang diperkotaan sulit untuk bisa tercapai.
2. Kekurangan kesadaran dari masyarakat untuk menjaga fasilitas umum yang telah dibangun
3. Masih belum optimalnya sosialisasi, kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat terkait fungsi trotoar sehingga banyak trotoar yang alih fungsi dari fungsi yang sebenarnya.
4. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai kebersihan lingkungan maupun perkotaan mengakibatkan masih ditemukannya tumpukan sampah dan membuang sampah bukan pada tempatnya.
5. Sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan yang masih kurang
6. Masih belum optimalnya jaringan saluran drainase kota yang ada, mengakibatkan banyak terjadi genangan air ketika turun hujan.

Solusi yang dapat dilakukan adalah diantaranya :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau
2. Memberdayakan petugas taman yang ada dilapangan untuk menegur atau mengingatkan apabila ditemukan masyarakat yang merusak fasilitas tersebut
3. Sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih dioptimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan perkotaan.
4. Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung operasional.
5. Pemeliharaan dan pembersihan jaringan drainase dan median jalan perkotaan

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

1. Perencanaan yang lebih baik terkait saluran drainase perkotaan dan lingkungan
2. Membuat papan informasi tentang tata tertib aturan untuk menjaga dan melestarikan fasilitas umum RTH yang tersebar
3. Rapat Koordinasi terkait pembahasan DED RTH
4. Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

Pemberian dan pemberlakuan sanksi yang jelas sebagai efek jera terhadap pelanggar aturan terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dan perkotaan

*Capaian Sasaran 2*

***Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas Perumahan Layak Huni***

***Indikator 1 : Persentase berkurangnya kawasan kumuh perkotaan***

Rumah merupakan kebutuhan pokok didalam urutan prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan penghuninya. Memiliki perumahan yang layak merupakan hak setiap Warga Negara Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap tahunnya, maka dengan sendirinya terjadi peningkatan kebutuhan rumah, terutama perumahan yang sesuai dengan kriteria rumah layak huni. Salah satu masalah perumahan adalah masih adanya kondisi rumah yang tidak layak huni di perkotaan maupun pedesaan pada kawasan permukiman kumuh, akibatnya rumah tidak berfungsi secara optimal karena mengalami kerusakan yang mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi penghuninya. Terlebih lagi bahwa penghuni dari rumah tidak layak huni merupakan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni menjadi tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai lini terdepan penyediaan rumah bagi masyarakat memiliki tanggung jawab yang besar, baik dalam hal program pembangunan rumah murah bersubsidi, fasilitasi pembiayaan perbankan, pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, dan lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa salah satu dari 6 (enam) urusan wajib Pemerintah Daerah dalam urusan pemerintahan konkuren adalah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Pembangunan perumahan dan permukiman menjadi prioritas utama dalam pembangunan karena berbagai kondisi yang harus ditangani, antara lain untuk memenuhi *backlog* ketersediaan rumah, ketersediaan lahan, rumah tidak layak huni, tingginya biaya konstruksi, rendahnya pendapatan masyarakat, dan pembangunan sarana dasar yang terbatas.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, khususnya Dinas Perumahan

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Bidang Perumahan dan

Permukiman berupaya membantu dalam peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, dengan memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang dilakukan di beberapa Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tanah Laut , yang bersumber dari dana APBN, (APBN-DAK). Dalam pencapaian tujuan peningkatan rumah layak huni telah dianggarkan dana pendampingan untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya dan melalui APBD TA 2019 sebagai berikut :

1. Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan Kegiatan Peningkatan Rumah Sederhana (dana penunjang) dengan *jumlah anggaran sebesar Rp. 148.750.000 realisasi Rp. 133.959.000 atau 90.00 % dan kegiatan Peningkatan Rumah Sederhana Rp. 99.591.050 realisasi Rp. 91.878.750 atau 92.00 %.*
2. Program Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan dengan *jumlah anggaran sebesar Rp. 269.963.750 realisasi Rp. 257.419.650 atau 95.00 %.*

Tahun 2019 untuk mencapai sasaran ini dilakukan melalui program bedah rumah bagi warga yang berpenghasilan menengah kebawah dengan memberikan bantuan bahan bangunan dan biaya untuk mendirikan bangunan.

Kegiatan Bantuan Peningkatan Rumah Sederhana pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2019 sbb :

Bantuan Peningkatan Rumah Sederhana ini dilaksanakan sebanyak 628 orang/unit penerima bantuan dengan 3 sumber dana, APBD, APBN & Dana Alokasi Khusus (DAK) & APBD Provinsi tahun anggaran 2019.

Kegiatan peningkatan rumah sederhana ini adalah jenis bansos uang terencana yang berdasar pada Basis Data Terpadu (BDT) dan usulan pemerintahan Desa, Peningkatan Rumah Sederhana ini mengacu pada BNBA (By Name By Address) Sumber Dana & Sasaran Penerima Bantuan Peningkatan Rumah Sederhana :

*a) APBD (100 orang / unit)*

- |                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| - Desa Martadah      | 2  | unit |
| - Desa Martadah Baru | 27 | unit |
| - Desa Bingkulu      | 8  | unit |

---

- Desa Gunung Raja	7	unit
- Desa Sambangan	5	unit
- Desa Pandahan	6	unit
- Desa bati-bati	5	unit
- Desa Nusa Indah	5	unit
- Desa Banyu Irang	4	unit
- Desa Gunung Mas	3	unit
- Desa Gunung Melati	4	unit
- Desa Kuringkit	14	unit
- Desa Handil Gayam	15	unit

*b) APBN (308 orang / unit)*

- Desa Panggung baru	51	unit
- Desa Kandangan Baru	50	unit
- Desa Bumi Jaya	28	unit
- Desa Sumber Mulia	25	unit
- Desa Pulau Sari	30	unit
- Desa Guntung Besar	25	unit
- Kelurahan Karang Taruna	19	unit
- Desa Pemuda	18	unit
- Desa Sungai Riam	16	unit
- Desa Tambang Ulang	16	unit
- Desa Sungai Jelai	30	unit

*c) Dana Alokasi Khusus / DAK (170 orang / unit)*

- Kelurahan Pelaihari	99	unit
- Kelurahan Angsau	16	unit
- Desa Sungai Riam	55	unit

*d) APBD Provinsi 50 orang / unit*

- Kelurahan Pelaihari	8	unit
- Kelurahan Angsau	1	unit
- Kelurahan Pabahanan	3	unit
- Desa Panggung	3	unit
- Kelurahan Karang T.	3	unit
- Desa Galam	2	unit



- |                      |    |      |
|----------------------|----|------|
| - Desa Sungai Bakar  | 6  | Unit |
| - Desa Tebing Sering | 4  | Unit |
| - Desa Tanjung       | 6  | Unit |
| - Desa Batakan       | 3  | Unit |
| - Desa Batalang      | 10 | Unit |

Kendala-kendala dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah swadaya/ Rehabilitasi rumah/ bedah rumah maupun program Penanganan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) antara lain:

- ✓ *Syarat administrasi penerima bantuan yang masih terkendala*
- ✓ *Kualitas rehabilitasi rumah yang kurang optimal*
- ✓ *Ketepatan penyelesaian pekerjaan yang masih rendah*
- ✓ *Aset fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum diserahkan*
- ✓ *Masterplan penanganan PSU masih belum ada*
- ✓ *Dokumen RP3KP Tidak Update*

Solusi dari kendala-kendala tersebut antara lain:

- ✓ *Fasilitasi dan validasi data administrasi yang terbaru*
- ✓ *Penguatan petunjuk teknis (Juknis) rehabilitasi rumah tidak layak huni*
- ✓ *Menginventarisir fasilitas umum dan fasilitas sosial*
- ✓ *Menganggarkan perencanaan masterplan PSU*
- ✓ *Review Dokumen RP3KP*

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

- ✓ *Koordinasi dan validasi data ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta instansi terkait*
- ✓ *Meningkatkan pengawasan dan sosialisasi*
- ✓ *Pengumpulan aset fasilitas umum dan fasilitas sosial*
- ✓ *Mencari potensi anggaran diluar APBD*



## B. Capaian Sasaran Strategis

### Sasaran 1. Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan

Indikator 1: *Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang sadar lingkungan*  
 Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca (GRK) yang mendapatkan data sumber emisi gas rumah kaca yang berasal dari sumber energi, proses industri dan penggunaan produk, pertanian/peternakan dan pengelolaan limbah padat melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. Pada tahun 2019 memiliki *jumlah dana sebesar Rp. 259.963.000, dengan realisasi dana sebesar Rp. 148.185.00 atau 57%.*

### Indikator 2: *Terwujudnya kampung iklim*

Tahun 2019, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan kegiatan Proklim. Yang mana kegiatan Proklim merupakan salah satu program dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Tahun 2019 seteah melewati serangkaian kegiatan yang dimulai dari bulan Maret 2019 sampaip dengan bulan November 2019, telah didaftarkan 3 (tiga) desa untuk mengikuti program kampung iklim ini. Desa-desa tersebut adalah Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap, Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung. Dan pada akhirnya mendapatkan hasil maksimal, yaitu Kategori Proklim Utama melalui Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari. Sedangkan Desa Sumber Jaya Kecamatan Kintap mendapatkan Kategori Proklim Madya dan Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung Kategori Proklim Pratama.

Pelaksanaan terhadap indikator 2 (dua) ini melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, dengan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim. Pada tahun 2019 memiliki *jumlah dana sebesar Rp. 259.963.000, dengan realisasi dana sebesar Rp. 148.185.000 atau 57%.*

*Sasaran 2 : Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup*

*Indikator : Persentase Pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti*

---

Hasil evaluasi dilakukan untuk dapat mengetahui suatu pengaduan sudah ditindaklanjuti apa belum, Dari pengaduan yang masuk berjumlah 12 (dua belas) pengaduan tersebut, hanya 5 pengaduan yang diregistrasi, sedangkan 7 (tujuh) pengaduan tidak diregistrasi karena tidak lengkap informasi yang disampaikan sesuai Pasal 10 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Hutan, yang berbunyi ;

Pengaduan paling sedikit memuat informasi :

- ✓ *Identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon, yang bisa dihubungi atau email.*
- ✓ *Lokasi kejadian*
- ✓ *Dugaan sumber atau penyebab*
- ✓ *Waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan*
- ✓ *Penyelesaian yang diinginkan; dan*
- ✓ *Informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke instansi penanggung jawab.*

Pengaduan yang tidak diregistrasi adalah sebagai berikut ;

- ✓ *Pengaduan berdasarkan surat Sekda No. 005/414/TAPEM/2010 terhadap PT. Bimo Taksoko Gono*
- ✓ *Pengaduan terhadap dugaan pencemaran dari aktivitas tambang batu-bara PT. Wahana Baratama Mining (PT. WBM), PT. Duta Dharma Utama (PT.DDU) dan PT. Indoasia kecamatan Kintap.*
- ✓ *Pengaduan masyarakat RT. 9/10 komp. Multimadya desa Liang Anggang terhadap PT. SNI kecamatan Bati-Bati, merupakan lanjutan dari pengaduan terdahulu.*
- ✓ *Pengaduan masyarakat terkait dugaan pencemaran akibat kebakaran limbah sisa produksi PT. Sukses Wijaya Adimamur Kecamatan Bati-Bati.*
- ✓ *Pengaduan melalui Anggota DPRD dugaan pencemaran dari aktivitas PT. Ciomas Adisatwa Kecamatan Bati-Bati*
- ✓ *Pengaduan masyarakat melalui media terkait sengketa lahan nipah antara masyarakat desa Asam-Asam dengan masyarakat desa Muara Asam-Asam Kecamatan Jorong*
- ✓ *Pengaduan masyarakat Banyu Irang dugaan pencemaran dari aktifitas PT. CJ Chieljedang Kecamatan Bati-Bati.*
- ✓ *Pengaduan masyarakat petani tambak Desa Muara Kintap RT. 08 terhadap dugaan pencemaran akibat aktivitas pelabuhan batu bara PT. SSDK Kecamatan Kintap, pengaduan ini merupakan lanjutan dari pengaduan sebelumnya.*

Pengaduan yang diregistrasi adalah sebagai berikut :

- ✓ Pengaduan dari Bapak Aar Rajab terhadap aktivitas pembekuan udang (Cold Storage) di Desa Jorong, Kecamatan Jorong
- ✓ Pengaduan dari Bapak Ahmad Rifaei terhadap Rumah Potong Ayam milik ibu Mardiyati di Jl.. Sawahan I, Kecamatan Pelaihari
- ✓ Pengaduan dari Bapak Labadu terhadap aktivitas pertambangan batu bara CV. Bumen Abadi di Desa Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar
- ✓ Pengaduan dari Bapak Rudi Setiawan terhadap aktivitas pertambangan emas rakyat di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin
- ✓ Pengaduan dari Bapak Suriansyah terhadap aktivitas pengeringan dan fermentasi ikan milik bapak Mashudi desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung.

Pengaduan yang diregistrasi dapat diklasifikasikan seperti terlihat pada tabel 21 berikut :

Tabel 21  
Klasifikasi Pengaduan per 31 Desember 2019

No.	Tanggal	Identitas Pengadu	Identitas Penerima Pengaduan	Sumber Pencemar	Media Lingk yang Tercemar	Pokok Aduan	Klasifikasi Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	08 April 2019	Aar Rajab	Antik IP/ Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Cold Storage an. H. Amir/Abdul Muhad Irham	Udara (bau yang sangat menyengat dan kebisingan)	Masyarakat yang berada disekitar lokasi usaha Cold Storage merasa terganggu dengan bau menyengat dan suara bising yang berasal dari aktivitas cold storage.	Pengaduan Lingkungan
2.	10 Mei 2019	Ahmad Rifaei	Antik IP/ Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Rumah Potong Ayam bu Mardiyati	- Air Sumur - Bau sangat menyengat pada TPS dekat lokasi	Masyarakat sekitar lokasi usaha rumah potong merasa terganggu dengan bau menyengat	Pengaduan Lingkungan

						dari limbah pemotongan ayam yang dibuang ke selokan dan TPS setempat	
3.	12 Juni 2019	Labadu	Antik IP/ Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Penambangan Batubara	Kebun karet warga	Tersumbatnya aliran sungai akibat aktivitas pertambangan sehingga aliran sungai tidak lancar/tersumbat yang menyebabkan kebun karet warga terendam air	Pengaduan Lingkungan
4.	19 Juni 2019	Rudi Setiawan	Antik IP/ Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Pertambangan emas rakyat Kecamatan Bajuin	Air Sumur	Keresahan masyarakat Desa Kunyit RT. 002/RW.001 yang terhadap aktivitas pertambangan emas yang diduga menyebabkan air sumur warga tercemar yang berdampak pada gangguan kesehatan kulit	Pengaduan Lingkungan
5.	19 Agustus 2019	Suriansyah	Antik IP/ Kasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	Usaha pengupasan kepiting dan pengeringan/p ermentasi ikan milik Bapak Mashudi	Pencemaran udara berupa bau yang sangat menusuk	Keresahan warga Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung akibat adanya bau yang sangat menusuk disekitar lokasi Usaha pengupasan kepiting dan pengeringan/per mentasi ikan milik Bapak Mashudi	Pengaduan Lingkungan

Sumber : Bidang P2KPLH DPRKPLH 2019

Foto-foto kegiatan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.



### *Sasaran 3 : Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan*

*Indikator : Persentase pelaku usaha yang taat terhadap aturan*

~~Hasil evaluasi ketaatan lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan di~~  
bidang usaha pertambangan dan pelabuhan khusus tambang adalah sebagai berikut :

- ✓ *Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat sebanyak 9 (sembilan) perusahaan dari 31 (Tiga Puluh satu) perusahaan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang usaha pertambangan dan pelabuhan khusus tambang*
- ✓ *Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat sebanyak 22 (Dua Puluh dua) perusahaan dari 31 (Tiga Puluh satu) perusahaan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang usaha pertambangan dan pelabuhan khusus tambang*

Telah dilakukan pemantauan, pembinaan, atau peringatan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut diatas.

Masih terdapat 22 (dua puluh dua) pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti izin pembuangan air limbah dan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), dan 3 (tiga) pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izinnya belum lengkap.

Bidang Pengawasan meliputi :

#### a) Pengawasan Di Bidang Usaha Industri dan Jasa

Hasil evaluasi ketaatan lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang industri dan jasa adalah sebagai berikut :

- ✓ *Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat sebanyak 7 (Tujuh) perusahaan dari 49 (Empat Puluh sembilan) perusahaan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang industri dan jasa*
- ✓ *Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak taat sebanyak 42 (empat puluh dua ) perusahaan dari 49 (Empat Puluh sembilan) perusahaan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang industri dan jasa.*

Telah dilakukan pemantauan, pembinaan, atau peringatan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut diatas.

Masih terdapat 42 (Empat Puluh dua) pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti izin pembuangan air limbah dan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), dan 3 (tiga) pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izinnya belum lengkap.

b) Pengawasan Di Bidang Usaha Perkebunan dan/atau Pengolahan Hasil Perkebunan

Hasil evaluasi ketaatan lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan adalah sebagai berikut :

- ✓ *Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat sebanyak 7 (tujuh) perusahaan dari 15 (Lima belas) perusahaan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan*
- ✓ *Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang Tidak taat sebanyak 8 (delapan) perusahaan dari 15 (Lima belas) perusahaan pelaku usaha dan/atau kegiatan di bidang perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan*

Telah dilakukan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut diatas.

Masih terdapat 8 (delapan) pelaku usaha dan/atau kegiatan yang izinnya belum lengkap, dan belum menyampaikan laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL secara periodik kepada Bupati tanah laut cq. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut.

Terdapat 2( dua ) perusahaan yang tidak beroperasi yaitu CV. Bella dan PT. Raden Pandji

Namun apabila dilihat dari tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup masih tergolong rendah yaitu 23 (dua puluh tiga) perusahaan dari 95 (Sembilan puluh lima) perusahaan yang dilakukan pengawasan yaitu sebesar 24,21 %.



*Tabel 22*  
*Persentase Pelaku usaha yang taat aturan*

No	Jumlah Perusahaan Taat	Persentase	Jumlah Perusahaan tidak taat	Persentase
1	23	24,21 %	72	75,79 %

*Sumber : Bidang P2KPLH DPRKPLH 2019*

Foto-foto kegiatan Pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan



Pada tahun 2019 kegiatan sosialisasi dihadiri oleh 19 perusahaan dari 30 perusahaan yang diundang, sehingga persentasenya sekitar 63,33 % peserta sosialisasi

- *PT. Mandiri Citra Bersama*
- *PT. PLN UPK Asam-asam*
- *RSUD H. Boejasin*
- *PT. SMART*
- *RS. Borneo Citra Medika*
- *PT. Pola Kahuripan Inti sawit*
- *PT. Gawi Makmur Kalimantan*
- *PT. Duta Dharma Utama*
- *PT. SNI*
- *PT. PN 13 Kebun Pelaihari*
- *PT. Arutmin Satui*
- *PT. Wahana Baratama Mining*
- *PT. BSKP*
- *PT. Jorong Barutama Greston*
- *PT. BTU*
- *PT. JAPFA Comfeed Indonesia*
- *PT. Karimata Timur*
- *PT. Bintang Jasa*
- *PT. Bandangan Tirta Agung*

Untuk mencapai indikator ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut melalui Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah melaksanakan program *Pengendalian*

*Pencemaran dan Perusakan Lingkungan melalui kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 215.000.000 dan dari pagu tersebut terealisasi sebesar Rp. 195.491.500 atau 90,93%*

**Sasaran 4 : Meningkatnya keasadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah**

**Indikator : Persentase bank sampah di masyarakat/ sekolah**

Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp. 361.436.500,- namun terealisasi sebesar Rp. 302.140.200,- atau 83,59 % dari pagu yang ditetapkan. Dan dari target 20 sekolah adiwiyata yang dicanangkan pada tahun 2019, berhasil terpenuhi.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan di Kabupaten Tanah Laut dibuktikan dengan berhasilnya mendapatkan penghargaan Kota Sehat / Adipura P1 tingkat Provinsi dan menerima penghargaan 1 Sekolah Adiwiyata tingkat Nasional. Serta terbentuknya kelompok masyarakat pengelola lingkungan yaitu berdirinya Bank sampah di Kabupaten Tanah laut

Upaya yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah :

- ✓ *membenahi fasilitas persampahan (perbaikan dan penambahan)*
- ✓ *Sosialisasi dan membuka inovasi pengelolaan sampah di masyarakat (membangun Bank Sampah, Menyiapkan Fasilitas pemilahan sampah, Menyiapkan 100 buah Tong Komposter di masyarakat, dan inovasi Kompos RT untuk mengolah sampah organik dari sumbernya)*
- ✓ *Pengadaan Mobil Bank Sampah*

Hambatan yang terjadi

- ✓ *sebagian alat/fasilitas persampahan ada yang rusak dan tidak berfungsi (mesin pencacah rusak/bak sampah pecah.*
- ✓ *kurangnya SDM sebagai pengelola sampah di masyarakat*
- ✓ *kurangnya fasilitas/alat pengolah sampah di masyarakat*
- ✓ *kinerja Bank Sampah belum optimal.*

Perolehan penghargaan lingkungan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 23 berikut :

Tabel 23  
Penerima Penghargaan Lingkungan 2019

No.	Nama  Orang/Kelompok/Organisasi	Nama  Penghargaan	Pemberi  Penghargaan	Tahun  Penghargaan
1	SMAN 1 Kintap	Adiwiyata Nasional	KLHK	2019
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH	Penghargaan Adipura P1	Provinsi	2019
3	Bank sampah Multi Madya, BS Panggung Berseri, BS Bersih Indah	Penghargaan Bank Sampah Tingkat Provinsi	Provinsi	2019

Sumber : Bidang P2KLH DPRKPLH 2019

#### Inovasi Pengelolaan Sampah dalam photo visual







Meningkatkan Pemilahan Sampah



Kegiatan Bank Sampah  
( Upaya pengurangan timbulan sampah )

Sebar 100 buah tong komposter di masyarakat dan sekolah untuk mengolah sampah organik dari sumbernya



*Sasaran 5 : Meningkatnya rumah layak huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)*

*Indikator : Presentasi rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)*

Maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan upaya peningkatan kualitas rumah swadaya di kawasan permukiman dan permukiman kumuh guna terpenuhinya rumah layak huni yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang dilakukan di beberapa Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tanah Laut , yang bersumber dari dana APBN, (APBN-DAK) sejumlah 619 unit rumah, dengan rincian sebagai berikut :

*Program Lingkungan Sehat Perumahan dengan Kegiatan Peningkatan Rumah Sederhana (dana penunjang) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 148.750.000 realisasi Rp. 133.959.000 atau 90.00 % dan kegiatan Peningkatan Rumah Sederhana Rp. 99.591.050 realisasi Rp. 91.878.750 atau 92.00 %*

✓ *Program Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 269.963.750 realisasi Rp. 257.419.650 atau 95.00 %.*

Pada tahun 2019 terealisasi peningkatan kualitas rumah swadaya sejumlah 619 dari target 628 unit, hal ini terjadi dikarenakan 9 (Sembilan) penerima bantuan meninggal dunia dan data tidak sesuai dengan SK awal yang ada, sehingga mempengaruhi prosentase capaian program kegiatan menjadi sebesar 99%.

Kegiatan Bedah Rumah Tahun 2019 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman



*Sebelum dibedah.....*



*Sesudah dibedah.....*

*Sasaran 6 : Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)*

*Indikator 1: Persentasi kawasan perumahan fasilitas PSU*

Rumusan kegiatan ini = jumlah perumahan yang mendapatkan PSU/ jumlah perumahan x 100%

Perencanaan, peningkatan dan pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasarana sarana utilitas umum dilaksanakan untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Peningkatan/pemeliharaan jalan tidak hanya pada perkerasannya saja, namun mencakup pula peningkatan/pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya.

Untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan program perencanaan dan peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan/fasilitas prasaran sarana utilitas umum pada beberapa lokasi, yaitu ;

- ✓ *Pemasangan Paving Blok Lingkungan PSGR Pabahanan*
- ✓ *Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Sejahtera Mandiri RT. 12*
- ✓ *Pemasangan Paving Block Pondok Pesantren Sirajul Huda*
- ✓ *Perkerasan Jalan Teluk Baru*
- ✓ *Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Perumahan Alfat*
- ✓ *Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Graha Bakunci*
- ✓ *Pemasangan Paving Blok SDN Pulai Sari 1 Kec. Tambang Ulang*
- ✓ *Pengaspalan Jalan Lingkungan Perumahan Karunia Kembar 2*
- ✓ *Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Nusa Indah Village*
- ✓ *Perkerasan Jalan Lingkungan Komplek Istana Kita Matah*
- ✓ *Pengaspalan Jalan Lingkungan Gang Mandiri Rt. 7C Rw. 03 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari*



- ✓ *Pengaspalan Jalan Lingkungan Penerangan 1 Rt. 10 Kelurahan Karang Taruna*
- ✓ *Pengaspalan Jalan Lingkungan Komplek Perumahan Sinar Alam Takisung (lanjutan)*

Dengan rincian realisasi anggaran kegiatan sebagai berikut ;

- ✓ *Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan jumlah Anggaran Rp. 176.483.550,- dan terealisasi sebesar Rp. 152.705.000,- atau 87 %*
- ✓ *Rehabilitasi/Pemelihara Jalan Lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.339.523.750 realisasi Rp. 2.306.900.150 atau 99.00 %*

Dalam penyelenggaraan pengelolaan prasarana sarana utilitas umum yang telah ada, perlu adanya suatu penanganan yang segera sebelum kerusakan meluas / meningkat. Hal ini dapat dilakukan bila koordinasi antara semua pihak yang terkait dengan masalah pemeliharaan rutin (operasional pemeliharaan) prasarana sarana utilitas umum berjalan secara baik dan lancar.

Perlu diperhatikan bahwa dalam mengelola suatu prasarana sarana utilitas umum yang telah ada, program yang telah direncanakan umumnya adalah program pembangunan dan program pemeliharaan. Program pemeliharaan justru merupakan keharusan pada setiap prasarana sarana utilitas umum, setiap prasarana sarana utilitas umum harus dilakukan pemeliharaan rutin dalam setiap periode/waktu dalam setahun, sesuai dengan tujuan pemeliharaan yang telah ditetapkan, yaitu mempertahankan prasarana sarana utilitas umum yang terjaga dan tercapai umur rencana serta tingkat pelayanan

yang optimal, maka pemeliharaan sarana prasarana utilitas umum merupakan hal penting dan perlu senantiasa dilakukan sesuai dengan tingkat kebutuhannya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya kawasan perumahan yang telah terpenuhi fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	Jumlah dokumen perencanaan rakyat dan kawasan permukiman	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen
2	Meningkatnya rumah layak huni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Jumlah rumah rakyat layak huni	628 unit rumah	619 unit rumah	100%	628 unit rumah

*Sasaran 7 : Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup*

*Indikator 1 : Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu*

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan tahun 2019 memiliki capaian program yaitu, tercapainya pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.253.035.500,- realisasi keuangan sebesar Rp. 239.045.100,- atau 94,47 %. Dari hasil kegiatan pemantaun kualitas air tahun 2019, parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu adalah 78,98%. Sedangkan

parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu 90%. Sehingga Persentase parameter kualitas air dan udara ambient hasil pemantauan yang memenuhi baku mutu adalah 84,49%.

Sedangkan keluaran kegiatan pemantauan kualitas lingkungan ini adalah 2 (dua) dokumen laporan uji kualitas air dan 2 (dua) dokumen laporan uji kualitas udara ambient. Adapaun rincian pelaksanaan pemantauan kualitas air tersebut sebagai berikut

✓ *Uji Kualitas Air*

*Ada 14 titik sampel air sungai dengan 17 parameter ditiap titiknya.*

*Ada 5 titik sampel air sumur dengan 12 parameter ditiap titiknya.*

*Ada 1 titik sampel air laut dengan 9 parameter.*

✓ *Uji Kualitas udara ambient*

*Ada 8 titik sampel udara ambient dengan 10 parameter ditiap titiknya.*

Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan tahun 2019 terdiri dari pengujian kualitas air dan pengujian kualitas udara ambient dilakukan sebanyak 2 periode mewakili musim penghujan dan musim kemarau.

Secara rinci lokasi tersebut , dapat dilihat pada tabel 24 berikut ini :

*Tabel 24*  
*Lokasi Kegiatan Pemantauan Kualitas Air*

<b>Lokasi dan Koordinat Titik Pemantauan Air Permukaan</b>				
<b>No</b>	<b>Lokasi Pemantauan</b>	<b>X</b>	<b>Y</b>	<b>Keterangan</b>
1	DAS Asam - asam	274202	9577674	Titik Pantau Bagian Hulu
		286527	9566934	Titik Pantau Bagian Tengah
		288624	9566062	Titik Pantau Bagian Hilir
2	DAS Kintap	302286	9591250	Titik Pantau Bagian Hulu
		296993	9584084	Titik Pantau Bagian Tengah
		301141	9573596	Titik Pantau Bagian Hilir
3	DAS Maluka	256676	9610069	Titik Pantau Bagian Hulu
		246344	9610269	Titik Pantau Bagian Tengah
		235743	9602452	Titik Pantau Bagian Hilir
4	DAS Tabanio	257393	9584009	Titik Pantau Bagian Hulu
		249756	9580793	Titik Pantau Bagian Tengah
		246490	9580745	Titik Pantau Bagian Hilir
5	Bendungan PTPN	253138	9588432	Titik Pantau
6	Danau Mina Tirta	253540	9579636	Titik Pantau
7	Pantai Tangkisung	234464 79	9571880	Titik Pantau

Lokasi dan Koordinat Titik Pemantauan Air Tanah				
No	Lokasi Pemantauan	X	Y	Keterangan
1	Sumur Komplek Datu Daim	252857	9581106	Titik Pantau Sumur Warga Angsau
2	Sumur Komplek Karunia Kembar	252978	9581060	Titik Pantau Sumur PDAM Angsau
3	Sumur Komplek Gagas Permai	254201	9579693	Titik Pantau Sumur Komplek Gagas Permai
4	Sumur Warga Angsau	252027	9578842	Titik Pantau Sumur Datu Daim
5	Sumur Bor PDAM Angsau	250126	9578210	Titik Pantau Sumur Komplek Karunia Kembar

Baku mutu untuk pengujian kualitas air mengacu pada :

- ✓ *Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 05 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Badan Air*
- ✓ *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolm Renang, Solus Per Aqua, dan Pemandian*
- ✓ *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416 Tahun 1990 tentang Persyaratan Kualitas Air Bersih.*

Tabel 25 Capaian IKU Pemantauan Lingkungan

No	Kinerja Utama	Indikator	Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian						Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2019 tc hadap	Ket
				Target	Tri 1	Tri 2	Tri 3	Tri 4	Capaian (%)			
1	Melaksanakan aksi bersih sungai	Jumlah sungai yang dibersihkan	2 Sungai	2 Sungai	1 Sungai				100%	5 sungai	1 Sungai	Aksi bersih sungai hari Air sedunia di lakukan di sungai Kandanga n
2	Melaksanakan Pengujian Kualitas air	Jumlah uji kualitas air	2 Dokumen Uji	2 Dokumen Uji		1 Dokum en Uji		1 Dokumen Uji	100%	2 Dokumen	2 Dokumen Uji	Pengerja an oleh Konsulta n dilaksana kan pada triwulan II bulan juni Triwulan III
3	Melaksanakan pengujian kualitas udara	Jumlah uji kualitas udara	2 Dokumen uji	2 Dokumen		1 Dokum		1 Dokumen Uji	100%	2 Dokumen	2 Dokumen Uji	Pengerja an oleh konsultan

	ambient	ambient		uji		en uji						dilaksana kan pada triwulan II bulan Juni di Triwulan III
<b>4</b>	Melaksanakan sosialisasi kualitas lingkungan	Jumlah kecamatan / skpd yang ikut sosialisasi	-	11 Kecamatan n 26 SKPD		11 Kecamatan	15 SKPD	11 SKPD	100%	11 Kecamatan 26 SKPD	11 kecamatan	Sosialisasi berbentuk penyebaran Surat Edaran

Sumber : Bidang P3LH DPRKPLH 2019

### Photo Visual Kegiatan

#### *Kegiatan Pengambilan Sampel Air Sungai Tabanio*



#### *Kegiatan Pengambilan Sampel Air Laut Takisung*



*Kegiatan Pengambilan Sampel sumur*

Dari pelaksanaan Pengujian kualitas udara air diperoleh :

- ✓ *Dari hasil analisa kualitas parameter air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) dan bendungan/danau berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui dominasi parameter yang tidak memenuhi baku mutu adalah TDS, TSS, besi, mangan, BOD, COD, Total Posfat, Colitinja dan Total Coliform*
- ✓ *Dari hasil analisa kualitas parameter air pada air tanah berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui ada beberapa titik lokasi yang memiliki parameter pH dan coliform yang tidak memenuhi baku mutu*
- ✓ *Dari hasil analisa kualitas parameter air pada air laut berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan diketahui parameter TSS dan DO yang tidak memenuhi baku mutu*
- ✓ *Dari hasil analisa penetapan status mutu air berdasarkan metode indeks pencemar pada 14 titik pantau Daerah Aliran Sungai (DAS) dan bendungan/danau diketahui bahwa terdapat 9 badan air yang memiliki status cemar ringan dan 5 badan air yang memiliki status cemar sedang*
- ✓ *Dari hasil analisa daya tamping beban pencemar pada DAS Asam – asam, DAS Kintap, DAS Maluka dan DAS Tabanio diketahui bahwa parameter dominan yang melebihi daya tamping beban pencemar adalah TSS, BOD dan COD*

Untuk pengujian kualitas udara ambient tahun 2019, dilakukan pengukuran kualitas udara ambien dan kebisingan dilakukan di beberapa lokasi diantaranya mewakili area perumahan, industri, terminal, perkantoran dan rekreasi di Kabupaten Tanah laut.



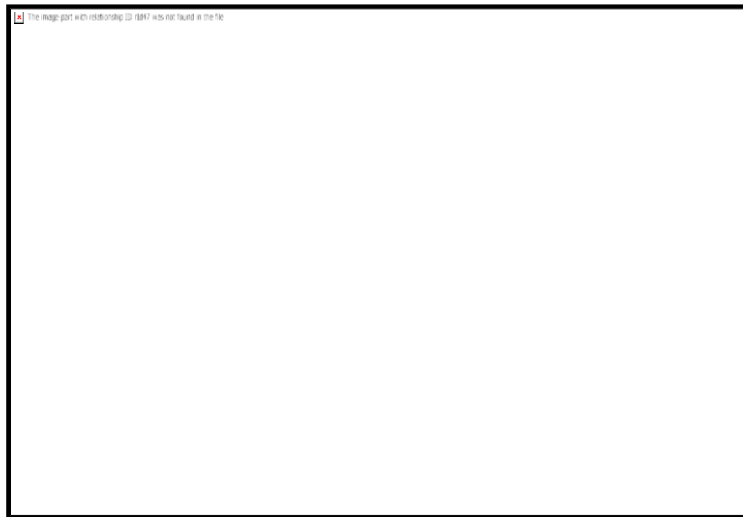
**Tabel 26**  
*Lokasi pengujian kualitas udara ambient Kabupaten Tanah Laut*

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Titik Lokasi</b>	<b>Titik Koordinat</b>
<b>1</b>	<i>Pelaihari</i>	<i>Depan Terminal Tanah</i>	<i>S 03° 48'08,4''</i>
		<i>Habang</i>	<i>E 114° 46'09,5''</i>
<b>2</b>	<i>Pelaihari</i>	<i>Perumahan Bajuin Raya</i>	<i>S 03° 47'08,2''</i>
			<i>E 114° 47'09,1''</i>
<b>3</b>	<i>Pelaihari</i>	<i>Simpang 3 Angsau</i>	<i>S 03° 47'24,9''</i>
			<i>E 114° 46'32,0''</i>
<b>4</b>	<i>Pelaihari</i>	<i>Depan Kantor Bupati Pelaihari</i>	<i>S 03° 47'59,6''</i>
			<i>E 114° 46'57,2''</i>
<b>5</b>	<i>Bati-bati</i>	<i>Depan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk Sukses Makmur Tbk</i>	<i>S 03° 32'59,1''</i>
			<i>E 114° 43'52,8''</i>
<b>6</b>	<i>Jorong</i>	<i>Simpang 4 Asam-Asam</i>	<i>S 03° 53'39,0''</i>
			<i>E 115° 05'55,2''</i>
<b>7</b>	<i>Takisung</i>	<i>Pantai Takisung</i>	<i>S 03° 52'04,8''</i>
			<i>E 114° 36'33,6''</i>
<b>8</b>	<i>Bajuin</i>	<i>Simpang 3 Sungai Bakar Bajuin</i>	<i>S 03° 46'42,1''</i>
			<i>E 114° 49'09,9''</i>

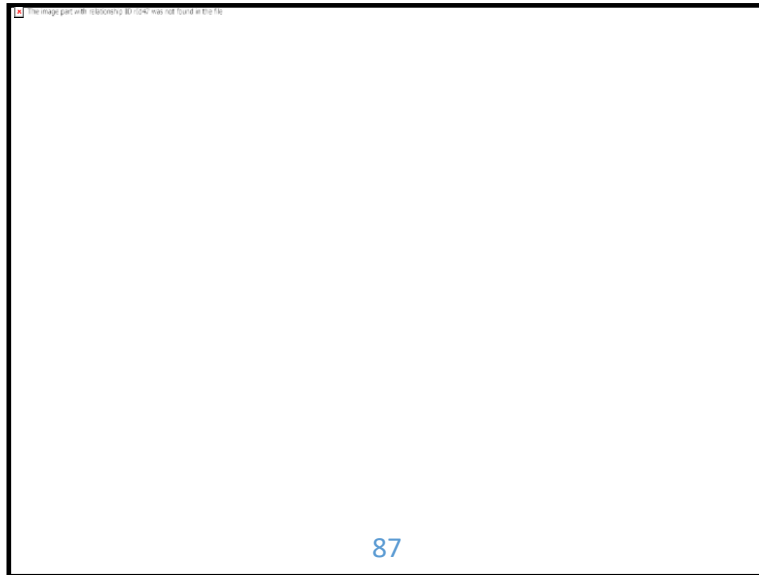
*Sumber : Bidang P3LH DPRKPLH 2019*

Photo Visual Kegiatan

*Kegiatan Pengambilan Sampel Udara di Simpang Tiga Asam-asam*



*Kegiatan Pengambilan Sampel Udara di Kantor Bupati Pelayhari*



*Kegiatan Pengambilan Sampel Udara di Terminal Tanah Habang  
Pelaihari*

Baku mutu untuk pengujian kualitas udara mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 053 Tahun 2007 Tentang Baku Mutu Udara Ambient dan Tingkat Kebisingan.

Dari pengujian kualitas udara ambient diketahui bahwa :

- ✓ Hasil uji kualitas lingkungan diketahui parameter yang melebihi baku mutu adalah parameter partikulat (TSP) dan kebisingan.
- ✓ Untuk parameter partikulat (TSP) yang melebihi baku mutu terdapat pada lokasi Perumahan Bajuin Raya, Desa Sungai Bakar Bajuin dan Simpang 4 Asam-Asam.
- ✓ Untuk parameter kebisingan yang melebihi baku mutu terdapat pada lokasi Perumahan Bajuin Raya, Depan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, Desa Sungai Bakar Bajuin, Simpang 3 Angsau, Simpang 4 Asam-asam.
- ✓ Nilai ISPU dengan kategori baik untuk semua parameter berada pada titik Pantai Takisung dan Kantor Bupati Tanah Laut.
- ✓ Nilai ISPU yang tinggi terdapat pada parameter partikulat dengan kategori sedang pada lokasi depan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk, terminal Tanah Habang dan simpang 3 Angsau sedangkan untuk kategori tidak sehat terdapat pada lokasi Perumahan Bajuin Raya, Desa Sungai Bakar Bajuin dan Simpang 4 Asam-asam.
- ✓ Tingginya nilai tingkat kebisingan dapat berdampak terhadap masyarakat yaitu pada gangguan psikologis tahap ringan yaitu terhadap gangguan tidur;

Kendala dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

- ✓ Belum terakreditasinya UPT. Laboratorium Lingkungan Kabupaten Tanah Laut untuk semua parameter air dan udara ambient.
- ✓ Kondisi cuaca yang tidak bisa ditebak pada saat pengambilan sampel.
- ✓ Antrian jadwal pengujian di laboratorium yang terlalu lama

Solusi yang akan dilakukan untuk peningkatan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten Tanah Laut antara lain :

- ✓ *Perlu adanya penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta penanaman pohon*
- ✓ *Melakukan perawatan terhadap mesin yang di miliki, baik mesin bergerak dan tidak bergerak*
- ✓ *Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola kualitas air serta udara ambient*

Rencana aksi untuk kegiatan pemantauan kualitas lingkungan :

- ✓ *Melaksanakan aksi bersih sungai*
- ✓ *Membuat edaran tentang menjaga dan mengelola kualitas air serta udara ambient*

*Indikator 2: Persentase parameter air limbah dan emisi/polusi udara hasil pengujian yang memenuhi baku mutu*

---

Berdasarkan hasil pelaksanaan pekerjaan pengujian kadar polusi limbah cair dan pengujian emisi / polusi udara akibat aktivitas industri dapat diketahui persentase parameter air limbah dan emisi / polusi udara akibat aktivitas industri yang memenuhi Baku Mutu adalah 95,70 %. Adapun penjelasan pelaksanaan pekerjaan pengujian kadar polusi limbah cair dan pengujian emisi / polusi udara akibat aktivitas industri dapat dijelaskan tabel 27 dan tabel 28.

Untuk kegiatan pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair pada Tahun 2019 jumlah dana Rp. 128.800.000,-. Realisasi anggaran Rp. 118.202.700,-yaitu terealisasi 91,77 %.

*Tabel 27*  
*Nama Perusahaan, Unit Pengelolaan Limbah Cair dan Titik Koordinat*  
*di Kecamatan Jorong dan Kintap*

No	Nama Perusahaan	Nama Unit PengelolaanLimbahCair	Koordinat		Keterangan
			X	Y	
1	PT. Anugerah LumbungEnergi	Settling Pond - 02	297903	9588375	Titik Inlet
			297855	9588371	Titik Outlet
2	PT. Arutmin Indonesia Site Kintap	Settling Pond - 13	289774	9569715	Titik Inlet
			289708	9569524	Titik Outlet
3	PT. Duta Dharma Utama	Settling Pond - 02	313905	9581575	Titik Inlet
			313467	9581595	Titik Outlet
4	PT. Jorong Barutama	WMM - 05	285925	9569366	Titik Inlet
	Greston		286025	9569278	Titik Outlet
5	PT. Mandiri Citra Bersama	Settling Pond Mandiri	298596	9564728	Titik Inlet
			298540	9564719	Titik Outlet
6	PT. Surya Sakti Dharma Kencana	Settling Pond - 03	305914	9571361	Titik Inlet
			305830	9571322	Titik Outlet
7	PLTU Asam - asam	Cooling Tower Unit 1 dan 2	289661	9565964	Titik Inlet
			289825	9565814	Titik Outlet

*Sumber : Bidang P3LH DPRKPLH 2019*

Tabel 28

Lokasi Kegiatan Pengujian Kualitas Limbah Cair Industri di Kecamatan Bati Bati dan Pelaihari

No	Perusahaan/Instansi	Lokasi	Koordinat	
			Inlet	Outlet
1	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk FD	Bati-Bati	03.34.30,17 S 114.43.41,95 E	03.34.30,17 S 114.43.41,95 E
2	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk BD	Bati-Bati	03.32.45,3 S 114.42.39,9 E	03.32.29,4 S 114.43.30,9 E
3	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	Bati-Bati	03.32.9.23 S 114.43.79,8 E	03.32.55,7 S 114.43.39,2 E
4	PT. KJW PKR	Bati Bati	03.33.10,95 S 114.42.29,6 E	03.32.57 S 114.42.24,2 E
5	PT. Karimata Timur	Bati-Bati	03.34.0,27 S 114.44.17,27 E	03.34.1,10 S 114.44.17,90 E
6	PT. Bridgestone Kalimantan Plantation	Bati-Bati	03.37.681 S 114.51.773 E	03.37.685 S 114.51.775 E
7	RSUD H. Boejasin	Pelaihari	03.47.58,6 S 114.46.46,1 E	03.47.58,6 S 114.46.46,1 E

Sumber : Bidang P3LH DPRKPLH 2019

Pengujian kadar polusi limbah cair tahun 2019, parameter yang diperiksa sebanyak 71 parameter. Dari 71 parameter, yang memenuhi baku mutu sebanyak 65 parameter. Sehingga persentase parameter air limbah yang memenuhi baku mutu adalah =  $(65/71) \times 100\% = 91,55\%$ .

Maksud dari kegiatan ini adalah mengadakan Pekerjaan Pengujian Kadar Polusi Limbah Cair Kabupaten Tanah Laut. Dokumen ini menyajikan informasi kepada publik tentang kondisi kualitas Pengujian Kadar Polusi Limbah Cair di Kabupaten Tanah Laut . Baku mutu air ditetapkan dengan tujuan untuk melestarikan fungsi air dengan cara pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Baku mutu air limbah adalah takaran atau ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan (PP No 82 Tahun 2001).

Instalasi pengolahan air limbah yang dibutuhkan sangat tergantung dari kuantitas dan kualitas air limbah yang diolah. Kuantitas berpengaruh terhadap besarnya dimensi IPAL sedangkan kualitas air limbah berpengaruh terhadap tingkat pengelolaan yang diperlukan dan dosis bahan kimia yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pengujian laboratorium terhadap kualitas air limbah mutlak diperlukan untuk mengetahui parameter pencemar yang ada yang perlu dinetralisir.

Kegiatan pemantauan kadar polusi limbah cair ditujukan untuk mengetahui dampak yang disebabkan oleh limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan industri atau pun pertambangan di Kabupaten Tanah Laut. Hasil dari pemantauan dapat dipergunakan untuk memberikan gambaran dan menyajikan informasi kepada publik tentang kondisi kualitas limbah cair akibat kegiatan industri dengan cara melakukan pengujian kadar limbah tersebut di laboratorium. Hasil dari kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pengendalian pencemaran air dan penetapan program kerja dan rencana aksi pengendalian pencemaran air.

Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran inlet pada unit pengeloaan air limbah pada kegiatan pertambangan batubara dan terminal khusus batubara, air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran inlet unit pengelolaan menunjukkan dominasi karateristik air limbah adalah sebagai berikut :

- ✓ *Sifat air sangat asam dan melebihi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)*
- ✓ *Memiliki kandungan Total Padatan Tersuspensi (TSS) yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku MutuLimbahCair (BMLC)*



- ✓ *Memiliki kandungan logam yang rendah dan memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Imbah Cair (BMLC) .*

Dari hal tersebut diindikasikan air limbah berasal dari area yang memiliki material Potential Acid Forming (PAF) yang cenderung membentuk air asam tambang (AAT).

Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran inlet pada unit pengolahan air limbah pada kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), karakteristik fisik air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran inlet unit pengelolaan menunjukkan karakteristik air limbah adalah sebagai berikut :

- ✓ *Sifat air berada pada range pH normal*
- ✓ *Memiliki kandungan free chlorine, Zn dan PO<sub>4</sub> rendah*
- ✓ *Semua nilai parameter air limbah telah memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal.*

Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran outlet pada unit pengolahan air limbah pada kegiatan pertambangan batubara dan terminal khusus batubara, karakteristik fisik air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran outlet unit pengelolaan menunjukkan dominasi karakteristik air limbah adalah sebagai berikut :

- ✓ *Sifat air berada pada range pH normal*
- ✓ *Memiliki kandungan Total Padatan Tersuspensi (TSS) yang rendah*
- ✓ *Memiliki kandungan logam yang rendah*
- ✓ *Semua nilai parameter air limbah telah memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 36 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC)*

Dari hasil pengamatan dan pengujian sample air pada aliran outlet pada unit pengolahan air limbah pada kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), karakteristik fisik air limbah adalah jernih, tidak berbau dan tidak ada lapisan minyak sedangkan berdasarkan Lembar Hasil Uji (LHU) pada sample air aliran outlet unit pengelolaan menunjukkan dominasi karakteristik air limbah adalah sebagai berikut :

- ✓ *Sifat air berada pada range pH normal*

- ✓ *Memiliki kandungan free chlorine, Zn dan PO<sub>4</sub> rendah*
- ✓ *Semua nilai parameter air limbah telah memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Thermal*

Dari hasil analisa efisiensi pengelolaan unit pengelolaan air limbah pada kegiatan pertambangan batubara, terminal khusus batubara dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diketahui bahwa system pengelolaan sudah efisien untuk mengelola air limbah agar memenuhi baku mutu yang telah ditentukan walaupun ada beberapa yang memiliki dampak peningkatan TSS dan kandungan logam namun hal peningkatan tersebut tidak terlalu besar dan masih dalam baku mutu yang telah ditentukan.

Dari hasil perhitungan beban sumber pencemar air tertentu diketahui bahwa walaupun parameter air dari unit pengelolaan sudah memenuhi baku mutu namun setiap unit pengelolaan air limbah tetap memberikan kontribusi aliran air yang mengandung mineral – mineral yang cenderung dapat menyebabkan pencemaran pada perairan

Pengambilan sampel limbah cair untuk industri di Kabupaten Tanah Laut meliputi kegiatan industri pakan ternak (PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Feed Division), pembibitan unggas (PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, Breeding Division), pengolahan makanan (PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk), karet ( PT. Pabrik Karet Remah Kintap Jaya Wattindo), hasil perikanan (PT. Karimata Timur), karet (PT. Bridgestone Kalimantan Plantation), fasilitas pelayanan kesehatan (RSUD H. Boejasin

Berdasarkan parameter hasil uji laboratorium sebagian besar perusahaan sudah memenuhi baku mutu limbah cair berdasarkan peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 . Untuk tahun 2019 hanya 2 (dua) perusahaan saja yang effluen air limbah nya berada diatas baku mutu yang telah ditetapkan yaitu : PT. Karimata Timur yang melebihi baku mutu yaitu parameter N-Total, BOD dan COD dan RSUD H. Boejasin yang melebihi baku mutu yaitu parameter MPN *Coliform*.

Beban pencemar terbesar terdapat pada parameter MPN *Coliform* yang berasal dari industri kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu RSUD H. Boejasin sebesar 242,10kg/hari dan beban pencemar terkecil yang dihasilkan untuk parameter minyak lemak yaitu 0,05 kg/hari.

Beberapa saran dan rekomendasi berdasarkan pelaksanaan hasil uji kadar polusi limbah cair adalah sebagai berikut :

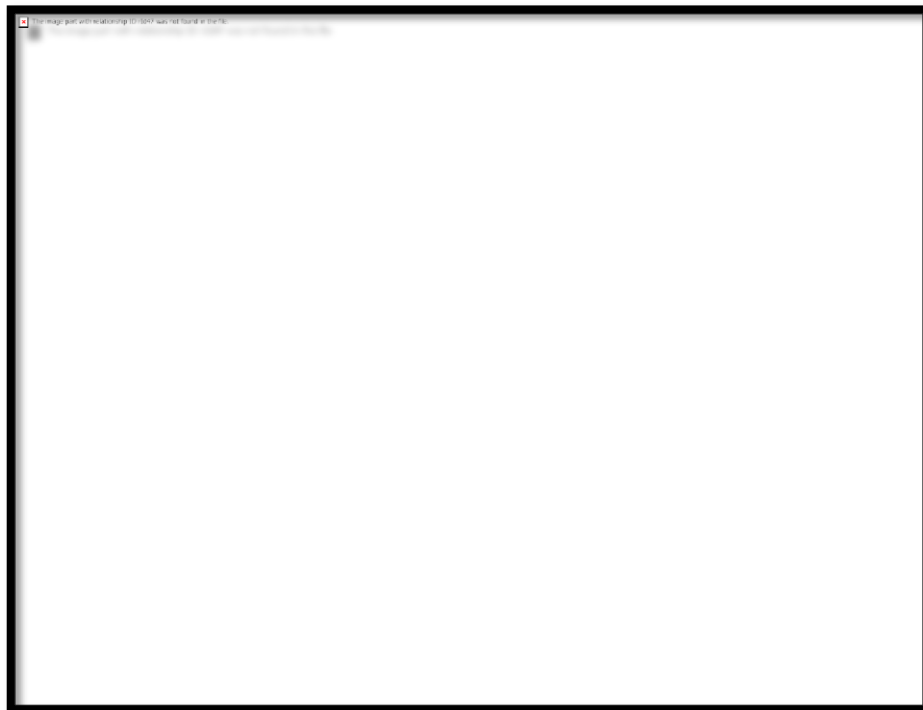
#### Bagi Dinas

- ✓ *Menambahkan parameter – parameter tambahan yang harus dikelola oleh pelaku usaha terkait parameter IKA yang dimiliki berkorelasi dengan dampak kegiatan pelaku usaha*
- ✓ *Melakukan inventarisasi aliran dari sumber pencemar hingga ke perairan.*
- ✓ *Membuat batasan besaran sumber pencemar dari pelaku usaha berdasarkan daya tampung beban pencemar sungai*
- ✓ *Melakukan kajian lebih lanjut terkait dampak pada sungai akibat beban sumber pencemar air tertentu dari pelaku usaha*
- ✓ *Perlu adanya kegiatan pengambilan sampling selama 2 kali dalam satu tahun yaitu di musim kemarau dan di musim penghujan sehingga dapat membandingkan beban pencemar yang terjadi di musim tersebut.*
- ✓ *Perlu adanya upaya pengurangan buangan limbah cair yang mengandung bahan organik ke perairan di Kabupaten Tanah Laut.*
- ✓ *Perlunya pemantauan secara reguler oleh pemerintah terhadap tempat usaha-usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air.*
- ✓ *Perlunya peringatan dari pihak berwenang terhadap tempat usaha yang belum memiliki sistem pengolahan air limbah.*
- ✓ *Perlunya pemantauan terhadap buangan limbah cair dari usaha kegiatan yang menghasilkan limbah cair di Kabupaten Tanah Laut.*
- ✓ *Perlu adanya kajian yang mendalam untuk memberikan ijin usaha baru terhadap pelaku usaha terutama untuk usaha yang berpotensi menghasilkan limbah cair yang mengandung limbah cair organik*

#### Bagi Perusahaan

- ✓ *Melakukan metode pengelolaan berdasarkan karakteristik air limbah*
- ✓ *Menjaga kualitas hasil pengelolaan air limbah untuk selalu memenuhi baku mutu*
- ✓ *Mengoptimalkan pengelolaan untuk menurunkan beban pencemar sumber air tertentu dari setiap unit pengelolaan*
- ✓ *Melakukan pengelolaan lanjutan terkait dampak pada sungai akibat beban sumber pencemar air tertentu dari pelaku usaha*

- ✓ *Membuat unit pengelolaan pada lokasi yang tidak memiliki material Non Acid Formed (NAF)*
- ✓ *Membuat dimensi unit pengelolaan dengan menyesuaikan luas catchment area dan beban pengelolaan*
- ✓ *Menerapkan metode Jar Test untuk menentukan dosis bahan kimia yang digunakan*



*Pengambilan Sampel Outlet IPAL  
PT. Japfa Comfeed Indonesia Feed Division*

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengujian kadar polusi limbah cair adalah :

- ✓ *Kondisi cuaca jika terjadi hujan akan terjadi pengenceran konsentrasi air limbah, sehingga tidak valid untuk dilakukan pengujian.*
- ✓ *Antrian jadwal laboratorium untuk melakukan pengujian kadar polusi untuk melakukan pengujian kadar polusi limbah cair*
- ✓ *Laboratorium lingkungan DPRKPLH yang belum terakreditasi*

Solusi yang dapat dilakukan adalah :

- ✓ *Mendorong agar UPT Laboratorium segera menyelesaikan proses akreditasinya, sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.*
- ✓ *Mendorong agar diterbitkannya regulasi yang mengatur tentang batasan maksimum debit air limbah dari kegiatan / usaha yang boleh dibuang ke badan air.*

Rencana Aksi :

- ✓ *Membuat surat edaran bupati tentang pengendalian pencemaran air.*

Pada Tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan pencapaian prosentase usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara ini telah didukung Program Peningkatan Pengendalian Polusi dengan Kegiatannya pengujian Emisi/ Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri jumlah dana sebesar Rp. 134.175.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 126.819.000,- atau 94,52 % Udara emisi adalah udara atau komponen-komponen yang dikeluarkan dari suatu kegiatan pembakaran (suatu proses tertentu) yang dikeluarkan langsung dari sumbernya. Pada umumnya ada dua sumber yaitu : sumber bergerak (kendaraan bermotor) dan tidak bergerak (kegiatan industri atau incinerator). Kegiatan proses pembakaran atau suatu proses emisi pencemar penting untuk dilakukan pengendalian. Dengan adanya peraturan tentang pengendalian pencemaran diharapkan pihak industri lebih peduli terhadap masalah lingkungan, dengan cara melakukan pengendalian pencemaran udara pada setiap proses yang menghasilkan gas buang.

Gas buang industri merupakan salah satu penyumbang pencemaran udara ke lingkungan. Semakin pekat gas buang maka semakin kotor udara emisi karena banyak mengandung partikulat. Setiap aktivitas industri menghasilkan tingkatan kepekatan asap yang berbeda-beda.

Pencemaran udara merupakan kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup. Industri dianggap sebagai sumber pencemar karena aktivitas industri merupakan kegiatan yang sangat tampak dalam pelepasan berbagai senyawa ke udara sebagai polutan. Polutan primer dikelompokkan menjadi dua, yaitu gas dan partikel. Gas dapat berasal dari hasil pembakaran senyawa-senyawa kimia dalam bahan bakar, sedangkan partikel dapat

berasal dari proses kondensasi, proses dispersi maupun proses erosi bahan tertentu, asap seringkali dipakai untuk menunjukkan campuran bahan partikulat. Asap merupakan salah satu indikator pencemaran lingkungan yang dapat diamati secara langsung berupa partikel kecil di udara akibat dari proses pembakaran tidak sempurna.

Maksud dari kegiatan pengujian emisi/ polusi udara dari sumber tidak bergerak adalah melakukan pengujian kadar emisi / polusi udara akibat aktivitas industri di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 adalah untuk menyajikan informasi kepada publik tentang kualitas lingkungan hidup khususnya kualitas emisi kegiatan industri yang berada di Kecamatan Bati-Bati , Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019. Tujuan kegiatan ini adalah :

- ✓ *Melakukan pengujian sampel emisi / polusi udara terhadap kegiatan industri yang berada di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;*
- ✓ *Mengetahui besaran emisi pencemar untuk dibandingkan dengan baku mutu emisi;*
- ✓ *Melakukan pemantauan kinerja alat pencegahan pencemaran;*

Pengukuran sampel emisi cerobong boiler/ genset pada Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap di laksanakan dengan melakukan pengukuran partikel, gas dalam cerobong boiler/ genset. Parameter yang diuji meliputi partikulat, gas nitrogen dioksida, gas sulfur dioksida, ammonia dan opasitas, sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 70 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas emisi gas Buang Kendaraan Bermotor.

Pengujian Emisi mesin tidak bergerak di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut dilakukan pada pelaku usaha/ industri sebagai berikut:

- ✓ *PT Citra Putra Kebun Asri di Kecamatan Jorong*
- ✓ *PT Kintap Jaya Wattindo di Kecamatan Kintap*
- ✓ *PT Surya Sakti Darma Kencana di Kecamatan Kintap*
- ✓ *PT Mandiri Citra Bersama di Kecamatan Kintap*
- ✓ *PT Pola Kahuripan Inti Sawit di Kecamatan Kintap*

Pada tahun 2019 untuk pelaksanaan pekerjaan pengujian emisi/ polusi udara akibat aktivitas industri dilakukan pengujian sebanyak 40 parameter udara emisi. Dari 40 parameter tersebut sebanyak 40 parameter telah memenuhi baku mutu emisi.

Sehingga persentase parameter yang memenuhi baku mutu emisi adalah =  
 $(40:40) \times 100 \% = 100 \%$ .

Hasil pengujian dan analisis data terhadap kualitas emisi aktivitas industri pada tahun 2019 yang dilakukan di Kecamatan Jorong dan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Parameter emisi utama yang diuji adalah nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ ), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Aktivitas industri telah dilakukan pengujian emisi pada PT Citra Putra Kebun Asri, PT Kintap Jaya Wattindo, dan PT Pola Kahuripan Inti Sawit yang mengoperasikan boiler.

- ✓ Hasil pengujian emisi masing-masing aktivitas industri memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2008 Lampiran I.15 baku mutu emisi untuk ketel uap yang menggunakan bahan bakar biomassa berupa serabut dan/atau cangkang.
- ✓ Kadar emisi  $\text{NO}_2$  tertinggi dihasilkan PT Citra Putra Kebun Asri sebesar  $151 \text{ mg/m}^3$  dan kadar emisi  $\text{NO}_2$  terendah dihasilkan oleh PT Kintap Jaya Wattindo sebesar  $65 \text{ mg/m}^3$ .
- ✓ Penyumbang beban emisi  $\text{NO}_2$  terbesar adalah PT Citra Putra Kebun Asri sebesar  $113.424 \text{ kg/tahun}$  dan penyumbang beban emisi  $\text{NO}_2$  terendah adalah PT Kahuripan Inti Sawit  $29.513 \text{ kg/tahun}$ .
- ✓ Kadar emisi  $\text{SO}_2$  tertinggi dihasilkan PT Citra Putra Kebun Asri sebesar  $55 \text{ mg/m}^3$  dan kadar emisi  $\text{SO}_2$  terendah dihasilkan oleh PT Kintap Jaya Wattindo sebesar  $34 \text{ mg/m}^3$ .
- ✓ Penyumbang beban emisi  $\text{SO}_2$  terbesar adalah PT Citra Putra Kebun Asri sebesar  $41.313 \text{ kg/tahun}$  dan penyumbang beban emisi  $\text{SO}_2$  terendah adalah PT Kintap Jaya Wattindo  $22.760 \text{ kg/tahun}$ .

Aktivitas industri telah dilakukan pengujian emisi pada PT Surya Sakti Darma Kencana dan PT Mandiri Citra Bersama yang mengoperasikan genset.

- ✓ Hasil pengujian emisi masing-masing aktivitas industri memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2008 Lampiran I.22 baku mutu emisi untuk industri jenis kegiatan lain.



- ✓ *Kadar emisi NO<sub>2</sub> tertinggi dihasilkan oleh PT Mandiri Citra Bersama sebesar 111mg/m<sup>3</sup>, sedangkan PT Surya Sakti Darma Kencana menghasilkan sebesar 21 mg/m<sup>3</sup>.*
- ✓ *Penyumbang beban emisi NO<sub>2</sub> terbesar adalah PT Mandiri Citra Bersama sebesar 193kg/tahun, sedangkan PT Surya Sakti Darma Kencana menyumbang sebesar 98 kg/tahun.*
- ✓ *Kadar emisi SO<sub>2</sub> tertinggi dihasilkan PT Surya Sakti Darma Kencana sebesar 8mg/m<sup>3</sup>, sedangkan PT Mandiri Citra Bersama menghasilkan sebesar 0 mg/m<sup>3</sup>.*
- ✓ *Penyumbang beban emisi SO<sub>2</sub> terbesar adalah PT Surya Sakti Darma Kencana sebesar 37kg/tahun, sedangkan PT Mandiri Citra Bersama menyumbang sebesar 0 kg/tahun.*

Saran yang dapat diberikan pada pelaku usaha dan instansi sebagai berikut:

*Pada pelaku usaha sebagai berikut:*

- ✓ *Meniadakan sumber-sumber pencemar, kalau memungkinkan dalam operasionalnya digunakan metode-metode atau sistem yang tidak menimbulkan pencemaran, misalnya menghilangkan pencemaran akibat penggunaan bahan bakar fosil dengan cara mengganti bahan bakar yang ramah lingkungan.*
- ✓ *Mengganti sistem operasi atau bahan baku dengan yang potensi polutannya lebih rendah, misalnya dengan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan sistem bakar yang lebih baik.*
- ✓ *Menggunakan alat pengolah atau pengendali pencemaran, maka pelepasan emisi pencemar (polutan) minimal dapat memenuhi regulasi atau baku mutu.*
- ✓ *Menanam berbagai jenis tanaman terutama yang menyerap emisi karbondioksida seperti pohon trembesi.*
- ✓ *Memperhatikan tentang area atau lokasi pengambilan sampel terutama untuk tingkat keselamatan kerja pada area/lokasi pengambilan contoh uji emisi cerobong meliputi tangga, hole sampling dan lantai kerja.*

Pengujian Emisi mesin tidak bergerak di Kecamatan Pelaihari dan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dilakukan pada pelaku usaha/ industri sebagai berikut:

- ✓ *PT. Perkebunan Nusantara XIII Pelaihari di Kecamatan Pelaihari*
- ✓ *PT. Japfa Comfeed Indonesia Feed Division, Tbk di Kecamatan Bati-Bati*
- ✓ *PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk di Kecamatan Bati-Bati*
- ✓ *PT. Sinar Nusantara Industri di Kecamatan Bati-Bati*



✓ *PT. Cheiljedang di Kecamatan Bati-Bati*

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data terhadap kualitas emisi kegiatan pelaku usaha/industri pada tahun 2019 yang dilakukan di Kecamatan Pelaihari dan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Parameter emisi yang utama diuji adalah nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) dan sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ ), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- ✓ *Kegiatan industri yang berada di Kecamatan Pelaihari dan Bati-Bati telah dilakukan pengujian emisi cerobong boiler pada masing-masing proses pengolahan pada PT. Perkebunan Nusantara XIII, PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk, PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk, PT. Sinar Nusantara Industries, dan PT. Cheiljedang diketahui bahwa hasil pengujian emisi masing-masing pelaku industri/usaha memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.*
- ✓ *Kadar  $\text{NO}_2$  tertinggi dihasilkan oleh PT. Sinar Nusantara Industries dan PT. Cheiljedang sebesar  $71 \text{ mg/m}^3$  dan kadar  $\text{NO}_2$  terendah dihasilkan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk sebesar  $25 \text{ mg/m}^3$ .*
- ✓ *Beban emisi  $\text{NO}_2$  yang dihasilkan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar  $16.322 \text{ kg/tahun}$  dan beban emisi  $\text{NO}_2$  terendah dihasilkan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk sebesar  $503 \text{ kg/tahun}$ .*
- ✓ *Kadar  $\text{SO}_2$  tertinggi dihasilkan oleh PT. Sinar Nusantara Industri sebesar  $126 \text{ mg/m}^3$  dan kadar  $\text{SO}_2$  terendah dihasilkan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk sebesar  $0 \text{ mg/m}^3$ .*
- ✓ *Beban emisi  $\text{SO}_2$  yang dihasilkan oleh PT. Perkebunan Nusantara XIII merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar  $12.934 \text{ kg/tahun}$  dan beban emisi  $\text{NO}_2$  terendah dihasilkan oleh PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk sebesar  $0 \text{ kg/tahun}$ .*

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengujian emisi adalah :

- ✓ *Kondisi cuaca jika terjadi hujan maka tidak mungkin untuk menaiki cerobong untuk mengambil sampel emisi.*

- ✓ *Antrian jadwal laboratorium untuk melakukan pengujian emisi akibat aktivitas industri*
- ✓ *Laboratorium lingkungan DPRKPLH yang belum terakreditasi*

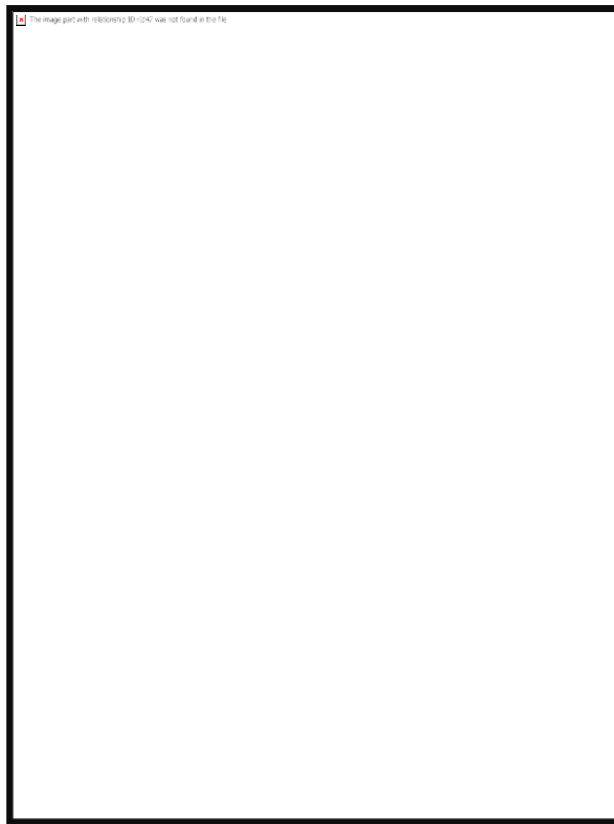
Solusi yang dapat dilakukan adalah :

- ✓ *Mendorong agar UPT Laboratorium segera menyelesaikan proses akreditasinya, sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.*
- ✓ *Memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memenuhi baku mutu emisi*

Rencana Aksi :

- ✓ *Melaksanakan sosialisasi tentang pengendalian emisi akibat aktivitas industri kepada pelaku usaha / kegiatan*

Photo Visual kegiatan pengujian emisi akibat aktivitas industri.



*Pengambilan Sampel di PT. Cheiljedang*

*Indikator 3. Persentase Parameter Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa yang tidak memenuhi ambang kritis*

---

Dana yang tersedia untuk kegiatan Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2019 adalah Rp.127.400.000,- Realisasi anggaran Rp. 78.408.900,- atau sebesar 61,55 % dengan sisa 48.991.100,-. Kegiatan pada Kajian Dampak Lingkungan berupa Jasa Konsultansi Informasi Status Kerusakan Lahan untuk produksi Biomassa.

Maksud dilakukannya kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan adalah sebagai berikut:

- ✓ *Membantu pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar pelaksanaan pembangunan pertanian.*
- ✓ *Mengadakan pengukuran kerusakan tanah untuk produksi biomassa.*

Tujuan :

- ✓ *Menanggapi tuntutan pembangunan*
- ✓ *Mewujudkan suatu tatanan kegiatan pertanian yang serasi dan seimbang.*
- ✓ *Memberikan rumusan untuk pengendalian kerusakan tanah sebagai akibat pembangunan untuk produksi biomassa.*
- ✓ *Mengetahui hasil identifikasi dari lahan terganggu.*

Hasil dari pengujian status kerusakan tanah untuk produksi biomassa tahun 2019 di Kecamatan Bumi Makmur adalah rusak ringan.

Berdasarkan hasil pengkajian Pada tahun 2019 Status Kerusakan Lahan untuk produksi biomassa yang dilaksanakan di Kecamatan Bumi Makmur adalah rusak Ringan pada kawasan PR-I (lahan basah) seluas 1.844,845 Ha dengan mengambil sampel sebanyak 8 buah titik sampel dan pada kawasan PR-II dengan kondisi (lahan basah) pada lahan seluas 5.012,229 Ha dengan mengambil sampel sebanyak 12 buah titik sampel Kecamatan Bumi Makmur.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kajian dampak lingkungan adalah :

- ✓ *Kondisi cuaca jika terjadi hujan maka tidak mungkin untuk dilakukan pengambilan sampel tanah karena pengujiannya menjadi tidak valid.*
- ✓ *Antrian jadwal laboratorium untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel tanah untuk kegiatan pengkajian dampak lingkungan*
- ✓ *Laboratorium lingkungan DPRKPLH yang belum mempunyai pengujian sampel untuk tanah.*

Solusi yang dapat dilakukan adalah :

- ✓ *Mendorong agar UPT Laboratorium untuk bisa menguji sampel tanah, sehingga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam lingkup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.*

Rencana Aksi :

- ✓ *Membuat leaflet tentang himbauan menghadapi kebakaran dan banjir.*

Hasil Pengujian Kerusakan Tanah Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 29.

Tabel 29  
Hasil Pengujian Kerusakan Tanah Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2019

<b>Luas (Ha)</b>	1.844,845	5.012,229
<b>Status</b>	PR I/ RI (LB)	PR II/ RI (LB)

Sumber : Bidang P3LH

**Keterangan :**

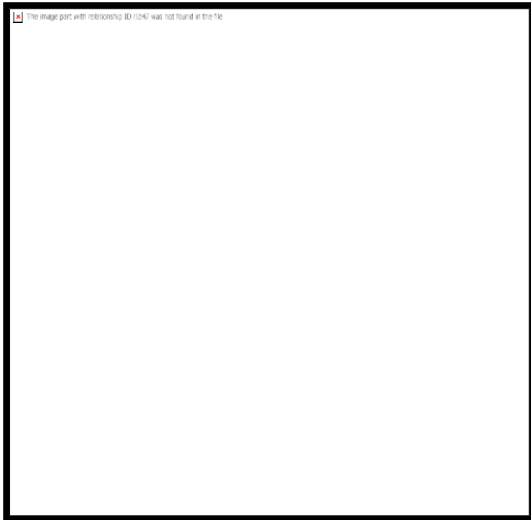
*LB : Lahan Basah*

*PR : Potensi Rusak*

*RI : Rusak Ringan*

Rekomendasi untuk mencegah kerusakan tanah antara lain mempertahankan luasan areal pertanian yang telah ada sesuai dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut dengan tetap mempertahankan sumberdaya lahan basah dan penerapan konservasi tanah dan air dalam budidaya tanaman pertanian pada lahan kering.

*Photo Visual Kegiatan*



Pengambilan Sampel Tanah

Pengambilan Sampel Tanah



Penyimpanan sampel tanah di tempat sampel

Proses pengambilan sampel tanah dengan bor tanah

*Sasaran 8. Meningkatnya Pelayanan Kebersihan, Kenyamanan Jalan Umum serta Keindahan*

*Indikator 1: Persentase sarana publik yang terang*

---

Kegiatan ini adalah berupa perencanaan pemasangan jaringan PJU baru, pelaksanaan pemasangan berdasarkan titik lokasi yang sudah direncanakan dan pemeliharaan jaringan PJU yang telah ada atau telah terpasang. Kegiatan ini juga

dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pelayanan, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, ini dikarenakan Penerangan Jalan Umum merupakan infrastruktur penting penunjang dan merupakan hak bagi masyarakat.

Pada tahun 2019 indikator kinerja utama peningkatan pelayanan dan kenyamanan jalan umum berupa pemeliharaan dan pemasangan jaringan PJU, dicapai melalui Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain dapat di lihat pada tabel 230 berikut ini :

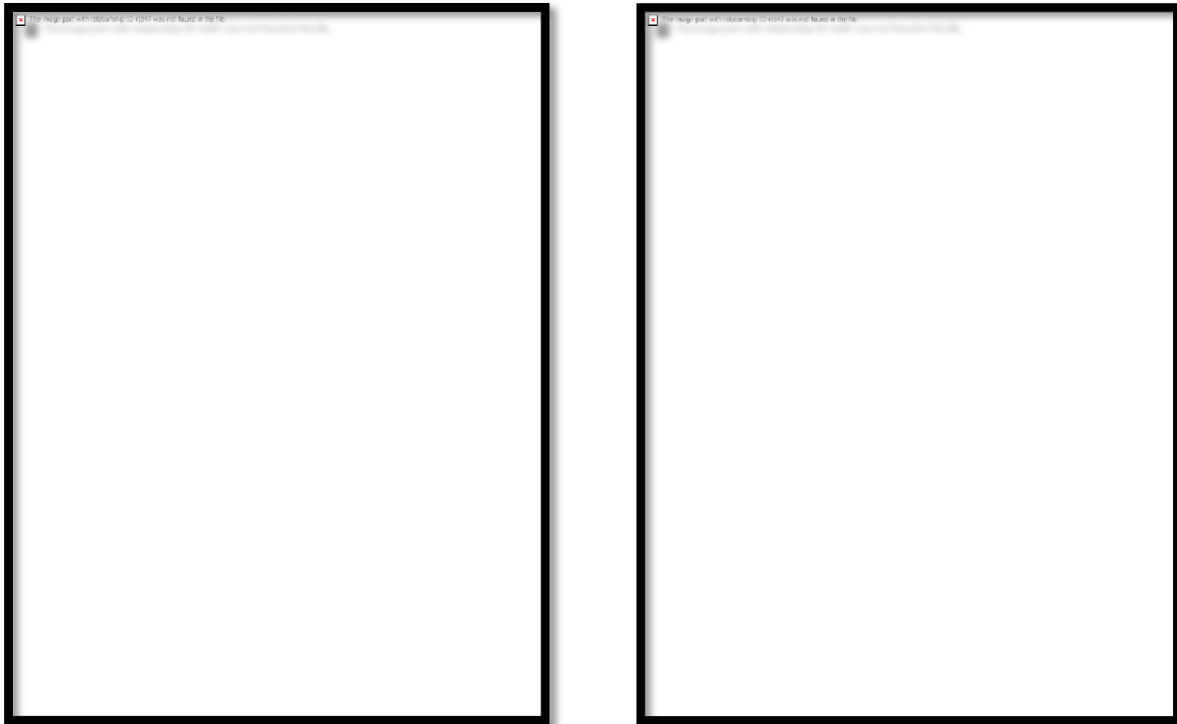
*Tabel 30*  
*Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keindahan Kota*

No.	Kegiatan	Lokasi	Target	Realisaasi	Ket.
1.	Pembayaran rekening penerangan jalan umum	Kab. Tanah laut	7.461.250.760	4.928.938.329	66,06 %
2.	Pemeliharaan jaringan penerangan jalan umum	Kab. Tanah laut	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100 %
3.	Pemeliharaan dan penggantian Ornamen PJU lengkap tersebar yang mengalami kerusakan	11 kecamatan	150 titik	150 titik	100 %
4.	Pemeliharaan dan pemasangan PJU tersebar	11 kecamatan	133 titik	133 titik	100 %
5.	Pengadaan dan pemasangan jaringan PJU Lengkap	Kec. Bumi Makmur	257 titik	257 titik	100 %
		Kec. Takisung	270 titik	270 titik	100 %
		Kec. Bati-Bati	182 titik	182 titik	100 %
		Kec. Kurau	22 titik	22 titik	100 %
		Kec. Pelaihari	178 titik	178 titik	100 %
		Kec. Jorong	252 titik	252 titik	100 %
6.	Pengadaan dan pemasangan jaringan PJU Lengkap tersebar	11 kecamatan	133 titik	133 titik	100 %

*Sumber : Bidang Tata Kota dan Kebersihan DPRKPLH 2019*

Kegiatan penyusunan perencanaan dan pemasangan penerangan jalan umum Tahun Anggaran 2019 memiliki capaian program yaitu tercapainya pemasangan penerangan jalan umum di lingkungan permukiman. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.610.596.600., dan yang terealisasi sebesar Rp.

10.213.064.779,- atau 80,99%. Sedangkan realisasi pemasangan penerangan jalan umum ini adalah 100 % (Seratus Persen).



Kendala –kendala dalam rangka pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum antara lain :

- ✓ *Masih ada beberapa permukiman yang belum mendapatkan jaringan listrik dari PLN dan masih merupakan jaringan swadaya masyarakat setempat, mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemasangan jaringan PJU*
- ✓ *Antara pemukiman satu dengan lainnya berjauhan sehingga membutuhkan material dan kebutuhan biaya yang banyak untuk menyambungkan jaringan PJU yang ada.*
- ✓ *Masih banyak permintaan pemasangan jaringan PJU dari masyarakat yang belum bisa dilaksanakan dan dipenuhi.*
- ✓ *Masih terbatasnya petugas dan sarana pendukung operasional pemeliharaan dan pemasangan jaringan PJU, mengakibatkan sering terlambatnya perbaikan dan pelayanan bagi masyarakat (jumlah sarana prasana dan petugas operasional tidak sebanding dengan jumlah titik lampu yang dipelihara).*

Solusi untuk kegiatan ini antara lain :

- ✓ *Perlunya kerjasama yang baik dengan pihak penyedia jaringan listrik yaitu PLN dalam hal penyediaan jaringan listrik bagi masyarakat secara merata.*



- ✓ *Perencanaan ulang mengenai pemasangan jaringan PJU, sehingga penyebaran PJU bisa merata dinikmati oleh masyarakat, salah satunya dengan pembagian jaringan dengan meterisasi.*
- ✓ *Alokasi dana yang cukup dari pemerintah daerah untuk pemerataan pemasangan jaringan PJU berdasarkan usulan masyarakat yang masuk.*
- ✓ *Perlunya pengadaan fasilitas sarana dan prasarana pendukung operasional PJU.*

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

- ✓ *Pecrencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.*
- ✓ *Adanya perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak PLN dalam hal pemasangan, pemeliharaan dan pemerataan jaringan listrik bagi masyarakat.*
- ✓ *Koordinasi dengan SKPD dan pihak terkait mengenai alokasi dana yang tersedia untuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan penerangan jalan umum*

#### *Indikator 2: Presentase Pelayanan Kebersihan, Kenyamanan Jalan Umum serta Keindahan*

---

Pengelolaan kebersihan, kenyamanan jalan umum serta keindahan sangat dibutuhkan dalam perkembangan kota, dimana pengelolaan pelayanan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap citra kota. Pengelolaan yang baik dan terarah akan menciptakan keindahan, kenyamanan dan kebersihan kota ataupun lingkungan permukiman.

Pada tahun 2019 indikator kinerja utama peningkatan penataan kota berupa ruang terbuka hijau, kebersihan dan kenyamanan jalan umum, dicapai melalui Program :

- ✓ *Program peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota*
- ✓ *Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan*

Kegiatan yang dilaksanakan adalah antara lain :

- ✓ *Pengelolaan dan pengolahan kebersihan dalam penanganan sampah*
- ✓ *Penataan kota serta ruang terbuka hijau*

✓ *Penataan dan pemeliharaan jalan umum*

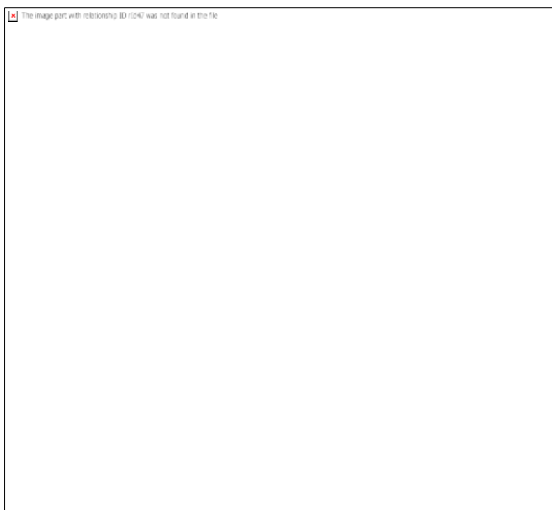
Indikator Kinerja Utama pelayanan kebersihan, kenyamanan jalan umum serta keindahan diantaranya adalah :

- ✓ *Meningkatnya ketersediaan fasilitas penanganan sampah dan system penanggulangan volume sampah*
- ✓ *Terkoordinasinya penyusunan kebijakan-kebijakan terkait kebersihan kota Pelaihari,*
- ✓ *Meningkatnya keamanan, kebersihan dan kenyamanan jalan umum bagi pengguna jalan dalam beraktivitas*
- ✓ *Kebersihan Kabupaten Tanah Laut Meningkat,*
- ✓ *Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana tugu, gerbang dan taman*
- ✓ *Terpeliharanya tugu, gerbang dan taman kota*

Untuk keindahan dan kenyamanan lingkungan sudah dilakukan oleh masyarakat perkotaan seperti sudah mulai sadarnya masyarakat untuk menjaga dan memelihara taman-taman yang ada di kota. Untuk luasan dan jumlah taman di kota Pelaihari sebesar 164 Ha atau sekitar 44% dari luas wilayah kota , secara rinci dapat dilihat pada tabel 20 lembar sebelumnya.

Untuk kegiatan dalam rangka melaksanakan kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan jalan umum dapat dilakukan dengan menyediakan tempat-tempat pembuangan sampah, pemeliharaan taman dan tanaman kota secara rutin, pemeliharaan dan mengembalikan fungsi trotoar jalan sebagai fungsi pejalan kaki dan pemeliharaan jaringan drainase kota.

### Photo Visual Kegiatan Kebersihan



*Kegiatan Pelayanan Kebersihan, Kenyamanan Jalan Umum serta Keindahan*

Untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota yang dilakukan antara lain :

Kegiatan penyusunan perencanaan dan pembangunan prasarana keindahan kota Tahun Anggaran 2019 memiliki capaian program yaitu tercapainya penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp.1.303.430,844,- dan yang terealisasi sebesar 1.149.501.700,- atau 86,40%..

Untuk melaksanakan kegiatan Kebersihan dan limbah yang dilakukan adalah:

Kegiatan penyusunan perencanaan dan pembangunan pengelolaan persampahan sebagai berikut Tahun Anggaran 2019 memiliki capaian program yaitu tercapainya

penyediaan sarana dan prasarana kebersihan. Kegiatan ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 9.497.211.006,- dan yang terealisasi sebesar 5.872.511.618,- atau 61,83%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan diantaranya adalah :

- ✓ Masih kurangnya lahan-lahan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga untuk mencapai 30% luas Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan amanat UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang diperkotaan sulit untuk bisa tercapai.
- ✓ Masih belum optimalnya sosialisasi, kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat terkait fungsi trotoar sehingga banyak trotoar yang alih fungsi dari fungsi yang sebenarnya.
- ✓ Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang mengenai kebersihan lingkungan maupun perkotaan mengakibatkan masih ditemukannya tumpukan sampah dan membuang sampah bukan pada tempatnya.
- ✓ Sarana dan prasarana pendukung operasional kegiatan yang masih kurang
- ✓ Masih belum optimalnya jaringan saluran drainase kota yang ada, mengakibatkan banyak terjadi genangan air ketika turun hujan.

Solusi yang dapat dilakukan adalah diantaranya :

- ✓ *Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mencari lahan atau lokasi baru dengan cara mengikuti ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat menambah luasan penambahan Ruang Terbuka Hijau*
- ✓ *Sosialisasi dan pemberian pemahaman lebih dioptimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar dan lingkungan perkotaan.*
- ✓ *Peningkatan dan pengoptimalan sarana dan prasarana pendukung operasional.*
- ✓ *Pemeliharaan dan pembersihan jaringan drainase dan median jalan perkotaan*

Rencana Aksi yang akan dilakukan antara lain :

- ✓ *Perencanaan yang lebih baik terkait saluran drainase perkotaan dan lingkungan*
- ✓ *Rapat Koordinasi terkait pembahasan DED RTH*
- ✓ *Perencanaan dalam hal Database Jaringan PJU Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.*

Pemberian dan pemberlakuan sanksi yang jelas sebagai efek jera terhadap pelanggar aturan terkait kebersihan, keamanan, kenyamanan dan keindahan lingkungan dan perkotaan.

*Sasaran 9. Meningkatkan kualitas perencanaan, keuangan, dan pelaporan*

*Indikator 1: Nilai SAKIP SKPD*

---

Kenaikan nilai komponen pelaporan pada LAKIP SKPD dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas laporan secara lengkap dan benar, baik laporan bulanan, triwulan maupun tahunan agar nilai LAKIP – SAKIP meningkat dan lebih baik.

Tahun 2019 ini nilai SAKIP Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2018 yaitu dengan katagori BB.

Dalam rangka meningkatkan nilai sakip Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup telah dilakukan upaya upaya antara lain :

- ✓ Melakukan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan perbaikan – perbaikan terhadap dokumen perencanaan yaitu Renstra, IKU, Renja
- ✓ Melakukan koordinasi dan meminta pendampingan kepada Bagian Setda Tanah Laut dalam rangka perbaikan dokumen IKU, Pohon Kinerja dan Perjanjian Kinerja.
- ✓ Melakukan penyelarasan dokumen Renstra dengan RKT, IKU, Perjanjian Kerja dan Pohon Kerja
- ✓ Melakukan *Coaching Clinic* untuk langkah langkah perbaikan dokumen laporan kinerja

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

## Sub Bagian Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan Pengelolaan perencanaan dan keuangan serta pelaporan kinerja dinas	Jumlah dokumen laporan keuangan dinas	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	100 Dokumen
Rata-Rata Capaian					100%	

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

## Sub Bagian Perencanaan

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan an pelaporan	Persentase kenakan nilai SAKIP SKPD	75,00 %	75,00 %	78,49%	4 Dokumen
Rata-Rata Capaian					78,49%	

### Sasaran 10 : Meningkatnya pengelola sarana dan prasarana kantor

*Indikator 1 : Persentase sarana dan prasarana yang dikelola sesuai standar*

Pada tahun 2019 untuk melaksanakan indikator ini telah dilakukan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :

- ✓ *Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran Rp. 159,500,000,00.- terealisasi sebesar Rp. 109,706,957,00.- dengan persentase 68,78%.*
- ✓ *Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 69,127,915,00.- terealisasi sebesar Rp. 69,127,915,00.- dengan persentase 88,04%.*
- ✓ *Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan anggaran Rp. 12,529,500,00.- terealisasi sebesar Rp. 12,461,000,00.- dengan persentase 99,45%.*
- ✓ *Penyediaan makanan dan Minuman dengan anggaran Rp. 50,736,000,00.- terealisasi Rp. 37,400,000,00.- dengan persentase 73,71%*
- ✓ *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan anggaran Rp. 680,000,000,00.- terealisasi Rp. 663,552,539,00.- dengan persentase 97,58%*
- ✓ *Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah dengan anggaran Rp. 27,000,000,00.- terelialisasi Rp. 25,800,000,00.- dengan persentase 95,56%*
- ✓ *Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran Rp. 17,880,000,00.- teralisasi Rp. 14,017,800,00.- dengan persentase 78,40%*
- ✓ *Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja dengan anggaran Rp. 29,250,000,00.- terealisasi Rp. 17,236,200,00.- dengan persentase 58,93%*
- ✓ *Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp. 51,226,600,00.- terealisasi Rp. 48,814,500,00.- dengan persentase 95,22%*
- ✓ *Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran Rp. 22,232,300,00.- terealisasi Rp. 22,232,300,00.- dengan persentase 99,92%*

- ✓ *Penyebarluasan informasi pembangunan daerah dengan anggaran Rp. 15,000,000,00.- kegiatan ini telah terealisasi Rp. 14,935,000,00.- dengan persentase 99,57%.*

**Sasaran 11. Meningkatnya Tata Kelola administrasi Umum dan Kepegawaian**

*Indikator 1 Persentase terkelolanya administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan*

Pada tahun 2019 untuk pemenuhan pengurusan administrasi umum dan kepegawaian dengan kegiatan :

- ✓ *Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD dengan anggaran Rp. 5,311,686,244,00.- terealisasi Rp. 5,198,937,381,00.- dimana kegiatan ini untuk pembayaran honorarium tenaga Pegawai Tidak Tetap SKPD serta pembayaran asuransi jaminan kesehatan.*
- ✓ *Penyusunan tabulasi data aset tetap dengan anggaran Rp. 31,500,000,00.- telah teralisasi Rp. 26,088,000,00.- dengan persentase 82,82%*

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut yaitu :

- ✓ *Kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga Pegawai Tidak Tetap untuk menunjang kinerja SKPD*
- ✓ *Kegiatan pengelolaan Aset SKPD maupun yang tersebar (BMD).*
- ✓ *Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, cuti.*
- ✓ *Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan pembayaran TPP berbasis E – Kita secara online.*
- ✓ *Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin aparatur pengawasan dalam hal berpakaian dalam pelaksanaan tugas-tugas rutin dan dalam hal mentaati jam kerja masuk kantor dengan melakukan pamarafan absen baik absen masuk dan pulang kantor serta mentaati apel baik apel gabungan hari Senin dan gabungan hari tertentu juga apel setiap hari di kantor.*



- ✓ *Penerapan disiplin aparatur dalam berbasis aplikasi online yaitu SIAP (Sistem Informasi Administrasi Presensi)*
- ✓ *Kegiatan surat menyurat dan pelaksanaan rumah tangga kantor.*
- ✓ *Pemeliharaan tugas-tugas rutin umum.*

Anggaran dan realisasi berdasar program tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 31 berikut ini :

*Tabel 31*  
*Anggaran dan Realisasi berdasarkan Program Tahun 2019*

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Tingkat Capaian Kinerja
I.	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>					
1		<i>Peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik</i>	159.560.000	121.774.347	37.785.653	76,32,
2		<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	121.479.040	46.596.967	74.882.073	38,36

3		Penyediaan jasa administrasi keuangan	106,050,000	99.250.000	6.800.000	93,59
4		Penyediaan jasa kebersihan kantor	94.581.000	80.602.900	13.978.100	85,22
5		Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja	24.800.000	7.745.000	17.055.000	31,23
6		Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000	37.146.500	2.853.500	92,87
7		Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	20.999.600	12.221.100	8.778.500	58,20
8		Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	-	-	-	-
9		Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	-	-	-	-

10.		Penyediaan makanan dan minuman	48.400.000	48.100.000	300.000	99,38
11		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	592.562.500	574.211.266	18.351.234	96,90
12		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam Daerah	-	-	-	-
II.	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>					
13		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	9.450.000	9.450.000	0	100,00
III.	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>					
14		Peningkatan rumah sederhana	188.416.000	168.473.000	19.943.000	89,42
15		Peningkatan rumah sederhana (DAK)	77.000.000	73.000.000	4.000.000	94,81
IV.	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan Persampahan</b>					
16		Peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	3.674.980.600	1.097.617.259	2.577.363.341	29,87
17		Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan	6.091.060.600	4.884.499.974	1.206.560.626	80,19

		persampahan				
18		Penyusunan kebijakan manajemen	290.820.900	206.008.900	84.812.000	70,84

*Sumber : Kasubbag Keuangan DPRKPLH TALA 2019*

Pada tahun 2019 presentase aset yang tercatat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah 100%, dimana aset-aset tersebut tersebar di seluruh SKPD dan seluruh kecamatan yang berada di Kabupaten Tanah Laut. Yang terdiri dari Tanah dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Setiap tahun di lakukan pengecekan secara berkala aset ke kecamatan-kecamatan untuk menyesuaikan pencatatan dengan kondisi di lapangan. Anggaran untuk kegiatan tabulasi data aset tetap adalah Rp. 31.500.000,- yang terealisasi adalah Rp. 26.088.000,-, anggaran tidak dapat terealisasi semua dikarenakan pada item belanja modal harga di DPA lebih rendah daripada harga di pasaran.



*Pengecekan Aset IPAL di Desa Atu-Atu*

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam melakukan tugas pelayanan memiliki UPT Laboratorium Lingkungan yang tugasnya meliputi pengujian sampel air, udara dan kebisingan dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.

Pada tahun 2019, UPT Laboratorium Lingkungan telah melakukan upaya untuk mendapatkan akreditasi dengan mengoptimalkan anggaran yang diperoleh dari APBD. Perbaikan yang dilakukan untuk menyesuaikan persyaratan untuk mencapai akreditasi berupa rehabilitasi gedung, penambahan daya listrik, pembelian alat dan bahan yang

menunjang pengujian parameter yang masuk dalam ruang lingkup yang akan diakreditasi.

Selain itu pelatihan teknis dan pengelolaan administrasi laboratorium juga dilakukan agar sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

UPT Laboratorium melakukan registrasi ke Komite Akreditasi Nasional dan menerima jadwal assesmen. Tim Assessor datang pada tanggal 08 – 09 Juli 2019 untuk memotret proses pelayanan sarana dan prasarana yang dimiliki UPT Laboratorium Lingkungan. Tim assessor mendapatkan beberapa temuan yang harus diperbaiki oleh laboratorium dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dengan kerjasama yang baik antar personel UPT Laboratorium lingkungan, temuan tersebut berhasil diselesaikan.

Pada tanggal 19 November 2019, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut mendapatkan status akreditasi sebagai laboratorium penguji dan laboratorium lingkungan dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-1356-IDN. Dengan demikian UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut telah menjamin mutu pengujian air bersih dan air limbah dan berharap dapat menghasilkan data valid dan *handal*, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun hukum.

### C. Akuntabilitas Keuangan

Ringkasan Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp 47.329.308.754,- (termasuk anggaran perubahan) yang terdiri dari :

1) *Belanja Tidak Langsung Rp 9.257.356.598,-*

Jumlah belanja tidak langsung jumlah ini dipergunakan untuk membiayai *belanja pegawai, pembayaran gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja pegawai.*

Tabel 32

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	5.055.141.560	3.509.137.749	69,42
2.	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	4.202.215.038	3.490.841.306	83,07
<b>Total</b>		<b>9.257.356.598</b>	<b>6.999.979.054</b>	<b>75,62</b>

Sumber : Subbag Keuangan DPRKPLH Tala per 31 Des. 2019

Dari tabel 32 diatas dapat di simpulkan bahwa realisasi anggaran Belanja tak Langsung Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tahun 2019 untuk belanja tidak langsung adalah **sebesar 75, 62% (SEDANG)**.

2) *Belanja Langsung Rp.38.071.952.156,-*

Jumlah belanja langsung tahun anggaran 2019 ini dipergunakan untuk membiayai program-program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan, yang terdiri atas 13 (tiga belas) program yang terdiri atas 44 (empat puluh empat) kegiatan. Tabel 33 berikut adalah realisasi anggaran Belanja Langsung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 , dimana dari tabel 33 ini terlihat jika realisasi anggaran Belanja Langsung **mencapai 78,61%**

Tabel 33

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1	PENDAPATAN	81.005.000,-	81.280.000,-	100,34
2	BELANJA OPERASIONAL	35.680.866.990,-	26.170.931.831,-	73,35
	Belanja Pegawai	9.257.356.598,-	6.999.979.054,-	75,62

	Belanja Barang/ Jasa	26.423.510.392,-	19.170.952.777,-	72,55
3	BELANJA MODAL	11.648.441.764,-	11.035.205.095,-	94,74
	Belanja Modal Tanah	260.000.000,-	249.522.000,-	95,97
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.050.579.264,-	3.589.479.545,-	88,62
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	478.050.000,-	473.387.450,-	99,02
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.762.812.500,-	6.630.312.100,-	98,04
	Belanja Modal Asset Tetap Lainnya	28.500.000,-	26.475.000,-	92,89
	Belanja Modal Asset Lainnya	68.500.000,-	66.029.000,-	96,39
4	Realisasi Anggaran Belanja Langsung DPRKPLH Th 2019	47.329.308.754,-	37.206.136.926,-	78,61

Sumber : Subbag Keuangan DPRKPLH 2019

Berikut adalah realisasi belanja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 *berdasarkan program kegiatan*

Tabel 34  
Realisasi Anggaran berdasarkan Program Tahun 2019

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Tingkat Capaian Kinerja
I.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		2.516.007.300	2.477.795.450	38.21.850	98,48
1		Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	176.483.550	170.895.300,00	5.588.250,	96,83
2		Rehabilitasi/pemeliharaan jalan lingkungan	2.339.523.750	2.306.900.150	32.623.600,00	98,61



No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Tingkat Capaian Kinerja
<b>II.</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana keindahan kota</b>		<b>13.941.027.444</b>	<b>11.362.566.479</b>	<b>2.578.460.965</b>	<b>81,50</b>
1	Pemeliharaan jaringan dan penerangan jalan umum		12.610.596.600,	10.213.064.779	2.397.531.821	80,99
2	Penyediaan sarana dan prasarana keindahan kota		1.330.430.844	1.149.501.700	180.929.144	86,40
<b>III.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>7.069.267.092</b>	<b>6.415.039.423</b>	<b>654.227.669,</b>	<b>90,75</b>
1		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	159.500.000,	109.706.957	49.793.043	68,78
2		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	69.127.915	60.862.000	8.265.915,	88,04
3		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.529.500	12.461.000	68.500,	99,45
4		Penyediaan makanan dan minuman	50.736.000	37.400.000,	13.336.000	73,71
5		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	680.000.000	663.552.539	16.447.461	97,58
6		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	27.000.000	25.800.000	1.200.000	95,56
7		Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	5.311.686.244	5.198.937.381	112.748.863	97,88
8		Penyediaan jasa pemeliharaan	568.595.833	152.738.746	415.857.087	26,86

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Tingkat Capaian Kinerja
		dan perizinan kendaraan dinas/operasional				
9		Penyediaan jasa administrasi keuangan	69.445.000	51.280.000	18.165.000	73,84
10		Penyediaan jasa kebersihan kantor	17.880.000	14.017.800	3.862.200	78,40
11		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	29.250.000,	17.236.200	12.013.800	58,93
12		Penyediaan alat tulis kantor	51.266.600	48.814.500	2.452.100,	95,22
13		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.250.000	22.232.300	17.700	99,92
IV.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		45.924.700	40.105.800	5.818.900	87,33
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	23.424.700	18.385.000	5.039.700	78,49
2		penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	22.500.000,	21.720.800	779.200	96,54
V.	Program Pengembangan Perumahan		269.963.750	257.419.650	12.544.100,	95,35
1		Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	269.963.750	257.419.650	12.544.100,	95,35
VI	Program Lingkungan Sehat Perumahan		248.341.050	225.838.550	22.502.500	90,94

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Tingkat Capaian Kinerja
1		Peningkatan rumah sederhana	99.591.050	91.878.750	7.712.300	92,26
		Peningkatan rumah sederhana (DAK)	148.750.000	133.959.800	14.790.200	90,06
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>		<b>9.497.211.006</b>	<b>5.872.511.618</b>	<b>3.624.699.388</b>	<b>61,83</b>
1		Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	300.820.050	56.634.600	244.185.450	18,83
2		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	541.101.800	358.549.400	182.552.400	66,26
3		Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	4.691.410.600	2.287.517.640	2.403.892.960	48,76
4		Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	3.544.709.556	2.752.779.478	791.930.078	77,66
5		Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (DAK)	419.169.000	417.030.500	2.138.500,	99,49
<b>VIII</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>		<b>3.611.771.814</b>	<b>2.851.042.202</b>	<b>760.729.612</b>	<b>78,94</b>
1		Pelaksanaan penilaian kota sehat/ adipura	431.464.800	189.844.800	241.620.000	44,00
2		Pemantauan Kualitas Lingkungan	253.035.500	13.990.400	239.045.100	94,47
3		Pengawasan pelaksanaan kebijakan	215.000.000	195.491.500	19.508.500	90,93

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Tingkat Capaian Kinerja
		bidang lingkungan hidup				
4		Pengelolaan B3 dan Limbah B3	123.655.800	77.844.900	45.810.900,	62,95
5		Pengkajian dampak lingkungan	127.400.000	78.408.900	48.991.100	61,55
6		Penyusunan AMDAL	76.679.414	49.618.500	27.060.914	64,71
7		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	361.436.500	302.140.200	59.296.300	83,59
8		Pengembangan laboratorium lingkungan	300.000.000	254.755.412	45.244.588	84,92
9		Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan	1.296.500.000	1.073.394.690	223.105.310	82,79
10		Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	76.599.800	44.498.200	32.101.600	58,09
11		Pengujian dan pelayanan laboratorium lingkungan (DAK)	350.000.000	346.000.000	4.000.000	98,86
IX	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>		<b>259.963.000</b>	<b>148.185.000</b>	<b>111.778.000</b>	<b>57,00</b>
1		Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	259.963.000	148.185.000	111.778.000	57,00

No.	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	% Tingkat Capaian Kinerja
<b>X</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>		<b>303.000.000,</b>	<b>269.609.000</b>	<b>33.391.000</b>	<b>88,98</b>
1		Pengembangan data dan informasi lingkungan	303.000.000	269.609.000	33.391.000	88,98
<b>XI</b>	<b>Program peningkatan pengendalian polusi</b>		<b>262.975.000</b>	<b>245.021.700</b>	<b>17.953.300</b>	<b>93,17</b>
1		pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	134.175.000	126.819.000	7.356.000	94,52
2		Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	128.800.000	118.202.700	10.597.300	91,77
<b>XII</b>	<b>Program kerjasama informasi dengan mas media</b>		<b>15.000.000</b>	<b>14.935.000</b>	<b>65.000</b>	<b>99,57</b>
		Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	15.000.000	14.935.000	65.000	99,57
<b>XIII</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>		<b>31.500.000</b>	<b>26.088.000</b>	<b>5.412.000</b>	<b>82,82</b>
		Penyusunan tabulasi data aset tetap	31.500.000	26.088.000	5.412.000	82,82
<b>JUMLAH</b>			<b>38.071.952.156</b>	<b>30.206.157.872</b>	<b>7.865.794.284</b>	<b>79,34</b>

Sumber : Subbag Keuangan DPRKPLH 2019

Dari Tabel 34 dapat diketahui jika tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 berdasarkan *Realisasi Anggaran berdasarkan Program* sebesar 79,34 %.  
Sedang Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja dapat dilihat pada tabel 35 berikut ini.

*Tabel 35*  
*Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja*

NO	ITEM ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE (%)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp. 9.257.356.598,-	Rp. 6.999.979.054,-	75,62
2	BELANJA LANGSUNG	Rp. 47.329.308.754,-	Rp. 37.206.136.926,-	78,61

*Sumber : Subbag Keuangan DPRKPLH 2019*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Selain sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis 2019 dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga menjadi cerminan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut..

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut telah dapat melaksanakan 14 (empat belas) sasaran dengan 2 Indikator Kinerja Utama sasaran dengan 12 sasaran strategis sesuai Renstra.

indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan dapat dilaksanakan dengan baik walau masih ada beberapa kendala dalam wujudkannya seperti:

- ✓ Belum sebandingnya antara peningkatan jumlah kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan ketersediaan SDM yang kompeten dalam pemantauan lingkungan & pengendalian pencemaran;
- ✓ Masih terbatasnya SDM dalam rehabilitasi kerusakan lahan dan lahan kritis, sesuai dengan target kinerja pelayanan SPM bidang lingkungan hidup;
- ✓ Masih terbatasnya pelayanan pengendalian pencemaran udara dan air;
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan pengaduan dan belum sesuainya penanganan pengaduan terhadap SOP;
- ✓ Semakin kompleknya permasalahan yang berdampak besar terhadap lingkungan;
- ✓ Masih kurangnya jumlah SDM/ tenaga lapangan baik untuk pengelola sampah maupun yang mengurus pertamanan;

- ✓ Masih kurangnya tempat penyimpanan sementara untuk sampah rumah tangga pada kawasan permukiman;
- ✓ Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan, pertamanan dan PJU;
- ✓ Kurang berdayanya masyarakat untuk memperbaiki rumah dan;
- ✓ Belum optimalnya penanganan prasarana utilitas (PSU) oleh masyarakat/pengembang.

### **C. Strategi Peningkatan Kinerja**

**Untuk peningkatan capaian sasaran strategis upaya yang akan dilakukan antara lain :**

Walaupun capaian kinerja tahun 2019 termasuk dalam kategori baik namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi untuk kegiatan yang manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

- ✓ Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.



**LAMPIRAN**

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Perbandingan Kinerja Tahun 2014 – 2018
7. Matrik Keselarasan

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan	Jumlah Pengawasan terhadap Pelaku Usaha dana/atau Kegiatan	72 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	95 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	132 %	368 Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
Rata-Rata Capaian					132 %	

Tabel. 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya penyelesaian pengaduan lingkungan hidup	Jumlah pengaduan bidang lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	5 Pengaduan	5 pengaduan	100%	10 Pengaduan
Rata-Rata Capaian					100%	

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa  
Lingkungan Hidup

**Lissa Ekawaty, S.ST**  
NIP. 19771102 200501 2 006



Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Bidang Keuangan

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Melaksanakan Pengelolaan perencanaan dan keuangan serta pelaporan kinerja dinas	Jumlah dokumen laporan keuangan dinas	25 Dokumen	25 Dokumen	100%	100 Dokumen
Rata-Rata Capaian					100%	

TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019

BIDANG PELAYANAN DAN PENGUJIAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGUJIAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN YAITU 15 KALI PENGUJIAN, 15 PARAMETER, 7 JENIS SAMPEL	JUMLAH PENGUJIAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	15 KALI PENGUJIAN	15 KALI PENGUJIAN	100 %	
		JUMLAH PENGUJIAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	15 PARAMETER	15 PARAMETER	100 %	
		JUMLAH PENGUJIAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN	7 JENIS SAMPEL	7 JENIS SAMPEL	100 %	
		JUMLAH SERTIFIKAT DAN TERAKREDITASINYA LABORATORIUM LINGKUNGAN	1 SERTIFIKAT AKREDITASI	1 SERTIFIKAT AKREDITASI	100 %	
2	Melaksanakan Kegiatan pengembangan Laboratorium Lingkungan	Terlaksananya operasional laboratorium lingkungan	1 laporan	1 laporan	100 %	
RATA-RATA CAPAIAN					100 %	

Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan

No	Rincian	Volume	Satuan	Anggaran	Realisasi				Fisik Tertimbang	Keterangan
					Fisik	Persen	Keuangan	Persen		
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3	orang/kali	1,200,000	0	0	0	0		
2	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	3	orang/kali	1,050,000	0	0	0	0		Tidak diperbolehkan untuk dicairkan, karena PjPHP dan PPBJ sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja /TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan )
3	Belanja spanduk / dekorasi / baliho	8	buah	2,400,000	8	100	1,875,000	78		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
4	Belanja Cetak	300	lembar	7,500,000	300	100	4,500,000	60		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
5	Belanja Penggandaan	12940	lembar	4,529,000	2333	18	699,900	15		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
6	<b>Belanja Makan Minum dan Rapat</b>									
	-Snack	30	Porsi	1,350,000	30	100	1,350,000	100		
	-Makan	30	Porsi	2,700,000	30	100	2,700,000	100		
7	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	7	pasang	4,550,000	7	100	4,410,000	97		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		orang / hari	47,200,000			9,090,000	19		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
9	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	1	dokumen	54,921,000	1	100	53,784,000	98		Disesuaikan dengan negosiasi hasil penawaran
				<b>127,400,000.000</b>			<b>78,408,900</b>			



Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan

No	Rincian	Volume	Satuan	Anggaran	Realisasi				Fisik Tertimbang	Keterangan
					Fisik	Persen	Keuangan	Persen		
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5	orang/kali	2,000,000	0	0	0	0.00		Tidak diperbolehkan untuk dicairkan, karena PjPHP dan PPBJ sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja /TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan )
2	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	5	orang/kali	1,750,000	0	0	0	0.00		
3	Belanja Alat Tulis Kantor			2,023,500			1,904,000	94.09		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
4	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih			2,501,000			2,348,000	93.88		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
5	Belanja spanduk /dekorasi/baliho	4	buah	1,200,000	4	100	486,000	40.50		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
6	Belanja penggandaan	4760	lembar	1,666,000	4002	84.07563	1,493,100	89.62		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
7	Belanja Makan dan Minum Rapat	240	kotak	10,800,000		0	6,750,000	62.50		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
8	Belanja Makan dan Minum Kegiatan	240	kotak	5,850,000	240	100	5,850,000	100.00		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
9	Belanja pakaian kerja lapangan	6	pasang	3,900,000	6	100	3,780,000	96.92		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
10	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah		orang / hari	16,345,000		0	13,630,000	83.39		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
11	Belanja Jasa Konsultasi Penelitian	4	dokumen	205,000,000	4	100	202,804,000	98.93		Disesuaikan dengan negosiasi hasil penawaran
				253,035,500			239,045,100			

Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair

No	Rincian	Volume	Satuan	Anggaran	Realisasi				Fisik Tertimbang	Keterangan
					Fisik	Persen	Keuangan	Persen		
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2	orang/kali	800,000	0	0	0	0.00		Tidak diperbolehkan untuk dicairkan, karena PjPHP dan PPBJ sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja /TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan )
2	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	2	orang/kali	700,000	0	0	0	0.00		
3	Belanja penggandaan	4450	lembar	1,557,500	3409	76.60674	1,022,700	65.66		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
4	Belanja Makan Minum Rapat									
	-Snack	40	porsi	1,200,000	40	100	1,200,000	100.00		
	-Makan	40	porsi	600,000	40	100	600,000	100.00		
5	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah		orang/hari	19,360,000			12,260,000	63.33		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
6	Belanja jasa konsultasi penelitian	2	dokumen	104,582,500	2	100	103,120,000	98.60		Disesuaikan dengan negosiasi hasil penawaran
				128,800,000			118,202,700			

Kegiatan Pengujian Emisi/Polusi Udara akibat aktivitas Industri

No	Rincian	Volume	Satuan	Anggaran	Realisasi				Fisik Tertimbang	Keterangan
					Fisik	Persen	Keuangan	Persen		
1	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2	orang/kali	800,000	0	0	0	0.00		Tidak diperbolehkan untuk dicairkan, karena PjPHP dan
2	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	2	orang/kali	700,000	0	0	0	0.00		
3	Belanja penggandaan	2700	lembar	945,000	2540	94.07407	762,000	80.63		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
4	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah		orang/hari	7,345,000			3,350,000	45.61		Disesuaikan dengan keperluan pekerjaan / kegiatan
5	Belanja jasa konsultasi penelitian	2	dokumen	124,385,000	2	100	122,707,000	98.65		Disesuaikan dengan negosiasi hasil penawaran
				134,175,000			126,819,000			

**Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**  
Seksi PKLH

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pengelolaan sampah & Lingkungan Hidup	Jumlah Bank sampah yang ternentuk di Masyarakat	10 Bank Sampah	10 Bank Sampah	100%	50 Bank Sampah
2	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Sekolah dalam Program Adiwiyata	Jumlah Sekolah yang melaksanakan program Adiwiyata	20 Sekolah	20 Sekolah	100%	100 Sekolah
Rata-Rata capaian					100%	

Kasi PKLH

**Ilyasa Khalik. S.KM**

NIP. 19770605 200003 1 003

Bidang Tata Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Target akhir RENSTRA
1.	Meningkatnya wilayah bebas pencemaran lingkungan	Jumlah dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100 %	10 dokumen
		Melaksanakan penerbitan SKKL, Rekomendasi UKL-UPL dan SPPL	1 SKKL, 14 Rekom UKL-UPL dan 20 SPPL	1 SKKL, 23 Rekom UKL-UPL dan 151 SPPL	100 %, 200% dan 755%	5 SKKL, 88 Rekom UKL-UPL dan 445 SPPL
		Terlaksananya proses perizinan Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	10 buah	45 buah	450%	30 buah
		Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Tanah Laut	2 dokumen	2 dokumen	100 %	10 dokumen

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Bidang Tata Kota dan Kebersihan  
Seksi Penerangan Jalan Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1		Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan dan Penerangan Jalan Umum	1 Tahun	1 Tahun	100%	
		Terbayarnya Tagihan Rekening Listrik untuk Penerangan Jalan Umum	1 Tahun	1 Tahun	100%	
		Terpasangnya Jaringan dan Penerangan Jalan Umum	40%	40%	100%	
Rata-Rata Capaian					100%	

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Bidang Tata Kota dan Kebersihan  
Seksi Pertamanan

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1		Meningkatkan tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana tugu, gerbang dan taman	1 Tahun	1 Tahun	100%	
Rata-Rata Capaian					100%	

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Bidang Tata Kota dan Kebersihan  
Seksi Kebersihan dan Limbah

NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1		Jumlah belanja alat tulis kantor berbayar	1 Tahun	1 Tahun	100%	
		Jumlah belanja jasa medis terbayar	1 Tahun	1 Tahun	100%	
		Jumlah belanja makan dan minum rapat terbayar	1.280 orang kali	1.280 orang kali	100%	
		Jumlah belanja makan dan minum kegiatan terbayar	800 orang kali	800 orang kali	100%	
		Jumlah belanja pakaian kerja lapangan terbayar	1270 stel orang	1270 stel orang	100%	
		Jumlah belanja pakaian keselamatan kerja terbayar	1 Tahun	1 Tahun	100%	
		Jumlah honorarium terbayar	1 Tahun	1 Tahun	100%	
		Jumlah pegawai honorer/ tidak tetap terbayar	132 orang bulan	132 orang bulan	100%	
		Belanja hadiah adipura kepada pekerja tidak tetap bidang tata kota dan kebersihan	160 orang	160 orang	100%	
		Belanja modal mobil tinja terbayar	1 unit	1 unit	100%	
		belanja modal mobil tangki terbayar	1 unit	1 unit	100%	
		Belanja modal mobil toilet portable terbayar	1 unit	1 unit	100%	
		Jumlah belanja makanan dan harian minum pegawai terbayar	61200 orang kali	61200 orang kali	100%	
		Rata-Rata Capaian				

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	SASARAN STRATEGIS	KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA
1.	Merencanakan dan menagadakan (Pemenuhan/Pembelian) serta melakukan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran	Jumlah Persentase 1. Dokumentasi pelayanan surat menyurat/kearsipan	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Persentase 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	68,78%	68,78%	68,78%
		Jumlah Persentase Penyediaan Jasa 3. pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100%	26,86%	26,86%	26,86%
		Jumlah Persentase 4. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	100%	78,40%	78,40%	78,40%
		Jumlah Persentase 5. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	88,04%	88,04%	88,04%
		6. Jumlah Persentase Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%	95,22%	95,22%	95,22%
		Jumlah Persentase 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	99,92%	99,92%	99,92%
		Jumlah Persentase 8. Penyediaan makanan dan minuman	100%	73,71%	73,71%	73,71%
		Jumlah Persente 9. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	99,45%	99,45%	99,45%
		Jumlah Persentase 10. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100%	58,93%	58,93%	58,93%
		11. Persentase Penyediaan jasa penunjang Kinerja SKPD	100%	97,88%	97,88%	97,88%
		Persentase Rapat-Rapat 12. koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	97,58%	97,58%	97,58%
		Persentase Rapat-Rapat 13. koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	100%	95,56%	95,56%	95,56%
2.	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, Kenaikan pangkat, pembuatan DUK, Pembuatan Karis/Karsu, Surat Keterangan Cuti, Surat Keterangan Pensiun)	Persentase Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun dengan baik dan tepat waktu	100%	89,99%	89,99%	89,99%
3.	Menyusun Tabulasi Data Aset Tetap	Persentase Jumlah aset yang tercatat	100%	82,82%	82,82%	82,82%
4.	Merencanakan Kebutuhan dan Usulan Pengembangan Pegawai	PersentaseJumlah Kebutuhan dan Usulan Pegawai	100%	95%	95%	95%
5.	Merencanakan dan mengadakan penyebarluasan informasi pembangun daerah	Persentase penyebarluasan informasi pembangunan daerah	100%	99,57%	99,57%	99,57%
Rata - Rata Capaian					98%	